PEMBERDAYAAN
PETANI

Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Kresno Sarosa Pribadi

draft Media

PEMBERDAYAAN PETANI

Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Kresno Sarosa Pribadi

CV. Draft Media
www.terbitkanbukumu.com

Pemberdayaan Petani

Penulis:
Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Kresno Sarosa Pribadi

Penerbit CV. Draft Media
www.terbitkanbukumu.com
Email: info@terbitkanbukumu.com
081365928370

Cetakan Pertama 2018

Editor : Muhammad Haryono
Desain Cover : Mohd. Yunus
Layout : Mohd. Yunus

Pemberdayaan Petani:
Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Kresno Sarosa Pribadi
iv + xxx hlm; 17,6 x 25 cm

ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Isu tentang pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat petani saat ini menjadi perhatian semua pihak. Kebaharuan teknologi yang bersanding dengan aras kearifan lokal dinilai cukup mampu menekan dampak negatif yang ada bahkan bisa meningkatkan produksi usaha tani. Salah satu introduksi teknologi tersebut adalah kegiatan pemberdayaan petani berbasis integrasi pertanian dan peternakan.

Buku Pemberdayaan Petani ini ditulis sebagai referensi mahasiswa Ekonomi Pembangunan yang mempelajari Ekonomi Pedesaan, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Kerakyatan. Buku ini disusun sedemikian rupa dengan harapan dapat membantu mahasiswa dalam memahami seluk beluk kegiatan pemberdayaan petani.

Buku Pemberdayaan Petani ini disusun berdasarkan pengalaman, referensi terkait pemberdayaan masyarakat, materi ajar kuliah ekonomi pedesaan dan ekonomi pertanian serta hasil penelitian yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan FEB UNS dan Kaprodi EP FEB UNS atas saran yang membangun, rekan-rekan staf Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB UNS, kolega periset KIMI Institute yang telah banyak membantu selama penyusunan buku ini serta penerbit yang bersedia menerbitkan buku ini.

Semoga buku Pemberdayaan Petani ini bermanfaat bagi para pembaca serta memperdalam wawasan mahasiswa tentang pemberdayaan petani. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis guna kesempurnaan buku ini

Surakarta, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

Bab 1. Pemberdayaan: Sebuah Pendahuluan 1
Bab 2. Pemberdayaan Kelompok 11
Bab 3. Strategi Pemberdayaan 17
Bab 4. Pentingnya Kelembagaan Dan Modal Sosial Dalam Menunjang Pemberdayaan 25
Bab 5. Pengembangan Gapoktan Sebagai Kelembagaan Petani 35
Bab 6. Definisi Ruminansia Dan Jenis-Jenisnya 41
Bab 7. Jenis Kambing Di Indonesia 45
Bab 8. Pengembangan Usaha Ternak Ruminansia Kecil 65
Bab 9. Usaha Ternak Kambing Berbasis Pertanian Integratif 77
Bab 10. Pentingnya Peran Stakeholders Terkait 85

Daftar Pustaka 93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lembaga Desa yang Berkaitan dengan Modal Sosial serta Fokus Pembahasannya 29
Tabel 2. Karakteristik Kambing Kacang (Dewasa) 47
Tabel 3. Kambing Boer (Dewasa) 49
Tabel 4. Karakteristik Kambing PE (Dewasa) 51
Tabel 5. Kambing Marica (Dewasa) 53
Tabel 6. Kambing Gembrong (Dewasa) 55
Tabel 7. Karakteristik Kambing Samosir (Dewasa) 57
Tabel 8. Karakteristik Kambing Muara (Dewasa) 59
Tabel 9. Karakteristik Kambing Kosta (Dewasa) 61
Tabel 10. Karakteristik Kambing Benggala (Dewasa) 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kambing Kacang 48
Gambar 2. Kambing PE.....52
Gambar 3. Kambing Marica 54
Gambar 4. Kambing Gembrong 56
Gambar 5. Kambing Samosir.....58
Gambar 6. Kambing Muara.....60
Gambar 7. Kambing Kosta 62
Gambar 8. Kambing Benggala 64

BAB 1
PEMBERDAYAAN:
SEBUAH PENDAHULUAN

Peningkatan perekonomian rakyat Indonesia dapat dilakukan melalui kegiatan agribisnis, karena dapat meningkatkan produk domestik bruto, kesempatan kerja dan berusaha, pangsa pasar dan ekspor, pendapatan petani, produktivitas perekonomian pedesaan serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan (Saragih, 2001). Program swasembada daging sapi dan kerbau pada tahun 2014 (PSDSK-2014) yang dicanangkan Pemerintah, merupakan tekad bersama dan menjadi program utama Kementerian Pertanian yang terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumber daya sapi dan kerbau nasional. Keberhasilan PSDSK-2014 akan sangat tergantung kepada partisipasi penuh seluruh masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Berdasarkan *blue-print* PSDS/K- 2014, dengan skenario *optimistic* bahwa target populasi sapi potong 14.423.000 ekor dengan penyediaan daging produksi nasional sebanyak 420,3 ribu ton (Kementerian Pertanian, 2010).

Peningkatan kesejahteraan khususnya pada petani di pedesaan dapat dicapai dengan jalan meningkatkan produksi dan pendapatan melalui paket-paket teknologi. Untuk itu perlu pengelolaan sebagai upaya untuk menciptakan petani sebagai pengelola yang mampu mengelola usaha tani secara profesional, sehingga diharapkan petani semakin andal dan mampu mengatasi problem teknis, ekonomi dan ekologis secara mandiri di masa yang akan datang. Menurut Mosher (1987), salah satu

syarat untuk memperlancar pembangunan pertanian adalah adanya kerja sama kelompok tani sehingga perlu adanya pengorganisasian wadah petani yang berupa kelompok tani. Adanya kelompok tani diharapkan petani bisa saling bertemu dan bermusyawarah secara bersama-sama untuk merencanakan suatu kegiatan. Wujud dari kegiatan kelompok tani bisa dicerminkan adanya pertemuan anggota kelompok secara rutin dan kegiatan gotong royong.

Berkembangnya populasi manusia, peningkatan kesejahteraan yang berdampak pada peningkatan konsumsi daging sapi dan kerbau dan komparasi harga di dalam negeri dan impor, masih dapat mengancam cadangan populasi sapi dan kerbau. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya alternatif dan taktis untuk mendukung swasembada daging sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Dalam kaitannya untuk meningkatkan produksi daging per ekor ternak per satuan waktu (produktivitas) pada ternak ruminansia kecil, Balai Penelitian Ternak dan Loka Penelitian Kambing Potong telah menghasilkan inovasi teknologi pemuliaan diantaranya rumpun (*breed*) dan galur (*strain*) baru domba dan kambing hasil penelitian, yang dapat dikategorikan sebagai bibit unggul. Rumpun baru tersebut dapat dikembangkan oleh pengguna untuk meningkatkan efisiensi usaha ternak.

Fasilitasi merupakan upaya dari kelompok tani untuk menyediakan modal (menyediakan modal yang berasal dari Bank, KUD, Hibah ataupun menghimpun dari anggota berupa koperasi simpan pinjam) guna membantu aktivitas usaha tani. Mediasi adalah upaya kelompok tani untuk menyampaikan gagasan kepada instansi-instansi terkait (BPP, BIPP, Bank, KUD ataupun perusahaan-perusahaan swasta). Kerja sama merupakan suatu kemampuan kelompok tani untuk menjalin hubungan

kerja, guna mendapatkan modal. Berdasarkan fakta ternak ruminansia kecil yang ada, potensi interaksi kelompok tani, dan peluang pengembangan rumpun dan galur baru domba/kambing hasil penelitian maka penulis mengusulkan program peran kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan bibit unggul ruminansia kecil ini.

Pemahaman pemberdayaan merupakan faktor kunci bagaimana program pemberdayaan akan dirancang, dilaksanakan, dan bagaimana hasil dari upaya pemberdayaan tersebut. Pemahaman akan pemberdayaan sendiri dimaksudkan agar segala upaya pemberdayaan yang dilakukan dilandasi pemahaman dan pendalaman yang jelas akan makna, tujuan, dan strategi pemberdayaan yang dijalankan. Sehingga proses berjalannya pemberdayaan tidak kehilangan arah akan tujuan sebenarnya yang ingin diraih yaitu membuat masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya dengan kesadaran dan kemampuan mereka sendiri.

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan positif di mana di dalamnya terdapat semangat berbagi untuk memampukan pihak yang kurang berdaya. Perjuangan untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan taraf kehidupan yang lebih baik pada pihak yang kurang berdaya harus dilandasi niat dan semangat dari pihak itu sendiri. Niat dan semangat menjadi penting agar pihak yang diberdayakan dapat berperan aktif dalam menyerap dan mengolah potensi yang dimiliki dengan dibantu dan difasilitasi oleh pihak pemberdaya.

Widayanti (2012: 91) berpendapat bahwa penting bagi kita dalam konteks pembahasan pemberdayaan untuk melihat paradigma yang digunakan. Paradigma akan berperan dalam membentuk apa yang kita

lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai akar masalah, serta masalah mana yang lebih bermanfaat untuk segera dipecahkan dan metode apa yang digunakan. Pendapat tersebut juga dapat diterapkan untuk melandasi upaya pemberdayaan yang akan dilakukan, sehingga pemberdayaan dilandasi juga dengan pemahaman yang cukup.

Sejalan dengan hal itu, Freire (dalam Widayanti, 2012: 91-93) menjelaskan tentang klasifikasi ideologi teori sosial yang dibagi dalam tiga kesadaran. Pertama, kesadaran magis (*magical consciousness*) yaitu kesadaran yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kesadaran ini lebih memfokuskan pada penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor - faktor diluar manusia, baik natural maupun supranatural. Salah satu contoh dari paradigma ini adalah melihat ketidakberdayaan dalam kehidupan merupakan takdir, ketetapan ataupun ujian dari Tuhan. Kedua, kesadaran naif yang melihat aspek manusia sebagai tokoh utama dan sentral yang menjadi akar penyebab masalah dalam masyarakat. Ketidakberdayaan dalam kesadaran ini cenderung menyalahkan aspek manusia itu sendiri kenapa tidak cukup kreatif dan cakap untuk bersaing, kenapa manusia malas bekerja, tidak memiliki jiwa kewirausahaan atau tidak memiliki budaya pembangunan, dan lain sebagainya. Ketiga, kesadaran kritis, yaitu kesadaran yang cenderung melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Sehingga kesadaran ini lebih memilih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut berakibat pada keadaan masyarakat.

Pentingnya sudut pandang dalam memaknai pemberdayaan tentu

akan berdampak pada strategi dan tujuan apa yang ingin dicapai melalui upaya pemberdayaan. Ketidakberdayaan bukanlah suatu takdir sehingga kondisi ini bukanlah merupakan suatu titik akhir dari kehidupan. Konteks pemberdayaan lah yang menjawab hal itu. Sedangkan apakah ketidakberdayaan bertumpu pada aspek manusia yang belum bekerja secara optimal ataukah masalah sistem dan struktur dari masyarakat, hal ini perlu dianalisis dan diperdalam lebih lanjut, karena tentu kondisi ketidakberdayaan suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lain pun demikian dengan akar masalah penyebab ketidakberdayaan. Karena bisa jadi yang dianggap masyarakat yang tidak berdaya itu karena memang malas sehingga disalahkan atau justru masyarakat tersebut belum bisa mengenal potensi diri dan lingkungan serta bagaimana memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana menganalisis akar masalah ketidakberdyaan, menemukan potensi yang belum dikelola secara maksimal, atau juga memasukkan teknologi dan inovasi baru yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan.

Prajono dan Pranaka (dalam Hutomo, 2000: 2) mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang dari tiga sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang tersebut dapat dijelaskan secara sederhana bahwa pertama, pemberdayaan merupakan upaya penghancuran kekuasaan (*power to no body*), kedua merupakan pembagian kekuasaan (*power to everybody*), dan ketiga pemberdayaan merupakan penguatan yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat (*power to powerless*). Sudut pandang pertama dan kedua dipandang kurang realistis, maka pemberdayaan seharusnya didasarkan pada sudut pandang yang lebih moderat, yaitu sudut pandang ketiga yang

memfokuskan pada pemberian kekuatan pada pihak yang lemah dan tersingkirkan.

Pemberdayaan dianggap sebagai suatu bagian integral dari pembangunan dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan sosial masyarakat. Rahayu (2014: 2) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang fokus perhatiannya ditujukan pada semua aspek prinsipil manusia di lingkungannya seperti aspek intelektual, material, fisik, dan manajerial. Aspek-aspek tersebut kemudian dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi menurut Chambers (dalam Hadi, 2009: 2) meliputi nilai-nilai sosial dan mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering,* dan *sustainable*. Sedangkan menurut Marx (Hutomo, 2000: 3) pemberdayaan masyarakat merupakan proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya dan perjuangan ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi yang dilakukan melalui perjuangan politik.

Ulasan di atas merupakan upaya menemukan jawaban kenapa pemberdayaan perlu dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Pemberdayaan merupakan upaya pemerataan keadilan, dimana pihak yang kurang berdaya perlu didampingi oleh pihak yang berlebih. Pendampingan tidak bisa dilakukan selamanya, karena pemberdayaan seharusnya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan harusnya memandang ke depan bahwa apa yang diberdayakan dapat berjalan secara berkelanjutan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi kemampuan yang dimiliki. Konsep pemberdayaan sendiri merupakan sebuah bentuk antitesis dari model pembangunan yang kurang berpihak pada masyarakat. Dasar logika pemahaman tersebut karena pertama, proses pemusatan kekuasaan dibangun berlandaskan pemusatan kekuatan faktor produksi; kedua, pemusatan faktor produksi yang terjadi akan melahirkan kelas pada masyarakat yaitu masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; ketiga, kekuasaan akan mempunyai kekuatan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi yang cenderung manipulatif untuk memperkuat legitimasi; keempat, berkaitan dengan logika ketiga, apabila berbagai sistem tersebut berjalan sistematik pada masyarakat akan melahirkan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya (Theresia *et. al.,* dalam Faizal, 2015: 40).

Pengamatan Hutomo (2010: 2-3) mengungkapkan bahwa konsekuensi dari sudut pandang tentang konsep pemberdayaan pada tataran pandangan ikut berdampak pada konsep pemberdayaan yang dijalankan di lapangan. Setidaknya terdapat tiga konsep pemberdayaan yang dijalankan di lapangan, pertama pemberdayaan konformis atau pemberdayaan yang berfokus pada "daun" dan "ranting" yang menganggap bahwa struktur sosial dan ekonomi sudah merupakan kemapanan dan *given,* sehingga yang diupayakan dalam pemberdayaan adalah penyesuaian dari yang lemah terhadap kondisi *given* tersebut. Upaya pemberdayaan yang dilakukan berupa perubahan sikap masyarakat tunadaya ataupun pemberian program sejenis santunan. Kedua, pemberdayaan reformis atau pemberdayaan yang berfokus pada

"batang" yang berpandangan bahwa struktur sosial, ekonomi, politik di masyarakat sudah tidak ada masalah, tetapi masalah timbul pada ranah operasional, sehingga pemberdayaan berkutat pada perubahan kebijakan operasional. Upaya pemberdayaan yang dilakukan berupa mengubah operasional yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up,* mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaannya. Ketiga, pemberdayaan struktural atau pemberdayaan yang berfokus pada "akar" yang memandang bahwa ketidakberdayaan masyarakat dikarenakan struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang salah dan tidak mendukung masyarakat lemah, sehingga perlu di tinjau ulang atau lebih baik dihancurkan. Upaya pemberdayaan ini bersifat memprovokasi masyarakat lemah untuk melawan struktur yang ada.

Teknis pemberdayaan seperti yang dijelaskan Hutomo sepertinya tidak dapat dijalankan secara parsial jika ingin mencapai tujuan pemberdayaan. Meskipun berat untuk menjalankan berbagai sektor tersebut, maka diperlukan sinergi berbagai pihak dalam menjalankannya. Baik yang melakukan pemberdayaan pada sektor "daun", "batang", maupun "akar" dalam konteks pendapat Hutomo, seharusnya memiliki pandangan holistik bahwa kegiatan yang dilakukan perlu bersinergi dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sektor lain. Sehingga meskipun melakukan upaya pemberdayaan pada sektor yang berbeda dengan cara yang berbeda, tetapi diharapkan mempunyai semangat yang sama dalam mencapai tujuan pemberdayaan.

Sumodiningrat (dalam Elizabeth, 2007: 36) berpendapat, makna pemberdayaan mencakup tiga aspek, yaitu: menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat setempat, memperkuat modal sosial masyarakat demi meningkat mutu

kehidupannya, dan mencegah serta melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin rendah. Hutomo (2000: 3) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan pada intinya adalah penguatan, baik penguatan pada kepemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, daya tawar dalam mendapat upah/gaji yang layak, serta keleluasaan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan.

Rahayu (2014: 10) mengungkapkan bahwa program pemberdayaan seharusnya berorientasi pada tujuan kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan, sehingga justru tidak seharusnya menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain atau pihak pemberdaya. Cholisin (2011: 2) berpendapat bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama agar masyarakat bisa terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan atau ketidakberdayaan. Sopandi (2010: 41) Memaknai pemberdayaan masyarakat dengan tidak menciptakan ketergantungan pada program-program pemberian, tetapi harus bisa diupayakan sendiri. Sehingga yang dituju adalah kemandirian masyarakat dalam upaya memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Andriyani, *et al.,* (2017: 5) melalui penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Panglipuran, Bali dalam mewujudkan desa wisata mempunyai konsep pemberdayaan yang unik. Konsep pemberdayaan di lokasi penelitian tersebut disinkretisasikan dengan falsafah ajaran agama Hindu yang dianut di Bali, yaitu *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan, kebahagiaan, dan kedamaian. Untuk keperluan pemberdayaan, falsafah ini diimplementasikan dalam aspek *parahyangan* (hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan), *pawongan*

(hubungan harmonis antar sesama manusia), dan *pelemahan* (hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan hidupnya). Sedangkan tahapan pemberdayaan yang dilakukan melalui tahapan penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan terakhir tahap pemberian daya.

Tujuan diadakannya pemberdayaan bukanlah suatu program semata yang dilakukan oleh pemberdaya baik dari pemerintah, akademisi, LSM, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan dalam pemberdayaan harus dapat berjalan secara berkelanjutan, meskipun pada suatu saat pihak pemberdaya melepaskan pendampingan kepada masyarakat. Sehingga kesadaran, tanggung jawab, dan kemandirian masyarakat harus ditumbuhkan karena harus ditumbuhkan. Oleh karena itu pemahaman akan identifikasi masyarakat beserta kondisi lingkungan hidupnya perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan dan strategi pemberdayaan yang akan dijalankan. Tentu dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat dapat mengelola potensi yang ada dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

BAB 2
PEMBERDAYAAN KELOMPOK

Pemberdayaan sebagai upaya mengembangkan masyarakat menuju kesejahteraan memiliki berbagai pendekatan dan strategi yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi dimana masyarakat tersebut. Pemberdayaan juga harus membangkitkan kesadaran dan kemudian kemandirian masyarakat. Bagaimanapun, pemberdaya dan program yang dijalankan tidak akan selamanya mendampingi dan memberi bantuan pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pemberdayaan yang dapat mengakomodasi penciptaan kemandirian masyarakat serta peran aktif masyarakat sendiri dalam menjalankan program pemberdayaan.

Berbagai pendekatan pemberdayaan dapat dijalankan untuk mencapai tujuan masyarakat yang lebih berdaya. Munandar (2008: 153) berpendapat bahwa pemberdayaan berdasarkan luas cakupannya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu;

1. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini Noor (2011: 96) mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai model pembangunan setidaknya mencakup tiga pendekatan yang harus dijalankan. Pertama adalah *targeted* dalam artian bahwa upaya pemberdayaan harus terarah dengan rancangan untuk memecahkan masalah dan tentunya sesuai kebutuhan. Kedua, peran aktif masyarakat yang diberdayakan sehingga masyarakat memiliki pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kegiatan pemberdayaan yang dijalankan. Ketiga, upaya pemberdayaan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk memudahkan masyarakat yang kesulitan dalam memecahkan masalah secara individu.

Salah satu pendekatan dalam menjalankan upaya pemberdayaan adalah melalui pemberdayaan kelompok. Pemberdayaan kelompok dilakukan pada lembaga sosial masyarakat yang telah ada ataupun dengan membentuk lembaga baru apabila memang belum ada. Pemberdayaan melalui kelompok dapat memupuk kemandirian masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan, di mana

masyarakat aktif menjalankan program tersebut. Melalui pemberdayaan kelompok juga diharapkan program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan, dimana kelompok masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjadi motor pengembangan masyarakat di daerahnya.

Salah satu kelompok masyarakat yang dapat menjadi wadah upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian adalah kelompok tani. Peran kelompok tani dapat memberikan dukungan untuk mencapai keberhasilan upaya pemberdayaan. Penelitian Elizabeth (2007: 37) menunjukkan bahwa faktor yang mendukung upaya pemberdayaan petani dapat dilihat dalam beberapa poin utama. Faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Adanya solidaritas petani pedesaan yang kuat.
2. Kelembagaan dalam pengertian struktur dan aturan main masyarakat merupakan hasil sendiri secara turun temurun sehingga cenderung lebih ditaati, dihargai dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersosialisasi.
3. Mekanisme kelompok petani yang berlaku lebih mengarah kepada keputusan menuju keadilan daripada mengarah ke persaingan.
4. Persepsi petani maupun buruh tani terhadap kedudukan dan peran usaha tani cenderung baik.
5. Tingkat partisipasi yang tinggi dari petani.
6. Kemampuan kelompok tani dalam beradaptasi terhadap agroekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan, maupun dinamika dalam menyiasati kemungkinan

eksploitasi oleh petani lapisan atas.

Selanjutnya Langi (2015: 8) berpendapat bahwa dalam pemberdayaan kelompok tani, perlu diupayakan penciptaan iklim dan suasana yang mendukung. Pertama, upaya harus terarah, sehingga melalui pemberdayaan program dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan sesuai kebutuhannya. Kedua, perlunya partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Hal ini diperlukan agar terjadi peningkatan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan ikut merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan program pemberdayaan yang dijalankan. Ketiga, perlunya menggunakan pendekatan kelompok. Melalui pemberdayaan kelompok, program pemberdayaan akan lebih efektif berjalan dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna.

Kelompok tani sendiri dibentuk berdasarkan atas kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan keakraban yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dapat dibentuk oleh sekumpulan petani, peternak ataupun pekebun (Departemen Pertanian dalam Wahyuni, 2010: 93). Kelompok tani ditujukan untuk mengorganisir petani sebagai anggotanya untuk mengembangkan usaha tani dengan melakukan berbagai kegiatan nyata dan juga sebagai wahana penyuluhan serta penggerak kegiatan anggotanya. Pengembangan kegiatan kelompok tani yang dilakukan seperti gotong royong, usaha simpan pinjam, dan arisan kerja sesuai kegiatan usaha tani (Hermanto dalam Nuryanti dan Swastika, 2011: 116-117).

Hermanto dan Swastika (2011: 373-374) mengungkapkan bahwa

kelompok tani merupakan suatu gambaran kegiatan-kegiatan para petani yang menjadi anggota berdasarkan kesepakatan yang dicapai bersama. Kegiatan kelompok tani ditentukan dengan pertimbangan pada kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, rasa saling kepercayaan, serta keserasian hubungan antar petani yang mana menjadi dasar rasa memiliki dan kontribusi dari kelompok tani yang dibentuk. Sedangkan kegiatan kelompok tani dapat berupa dalam hal pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan pengolahan hasil tani.

Wahyuni (2010: 93) menekankan bahwa kelompok tani biasanya berbentuk organisasi non-formal yang dikembangkan dari, oleh dan untuk kepentingan anggota. Keanggotaan kelompok tani mempunyai karakteristik modal sosial yang kuat, seperti saling mengenal antar anggota, memiliki keakraban, rasa saling percaya, serta pembagian tugas dan wewenang yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Kelompok tani dibentuk dengan harapan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan seputar usaha tani serta wahana pertemuan untuk menjalin kerja sama dalam upaya mengoptimalkan usaha tani yang dilihat dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya.

Pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok tani agar lebih optimal serta dapat mencapai tujuan tercapainya kesejahteraan petani tidak dapat terlepas dari aspek-aspek yang melingkupinya. Hermanto dan Swastika (2011: 383) berpendapat bahwa pemberdayaan harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain, pertama perlunya pemahaman potensi dan kelemahan kelompok tani, kedua perlu memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi, ketiga ketepatan dalam memilih berbagai alternatif pemecahan masalah, serta keempat upaya pemberdayaan perlu memperhatikan aspek kehidupan

kelompok dan masyarakat yang serasi dengan lingkungannya secara kesinambungan.

Upaya pemberdayaan melaui kelompok tani dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun lembaga lain yang cakap dalam melakukan upaya pemberdayaan. Pemberdaya kelompok tani mempunyai tugas untuk mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan petani dalam kelompok tani untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan bersama (Hermanto dan Swastika, 2011: 388).

BAB 3
STRATEGI PEMBERDAYAAN

Strategi pemberdayaan dimaksudkan agar proses berjalannya pemberdayaan dapat berjalan sesuai tujuan yang disasar. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang nantinya disusun dalam strategi pemberdayaan dan diturunkan menjadi langkah-langkah strategis yang dapat dijalankan. Fokus dan tujuan dari pemberdayaan seperti yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya tidak dapat dilepaskan dalam penyusunan strategi pemberdayaan.

Dharmawan (dalam Tampubolon, 2013: 154) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan merupakan suatu perubahan yang terencana dan relevan dengan persoalan lokal yang dihadapi oleh anggota komunitas masyarakat. Sehingga pengembangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi, dan keyakinan anggota komunitas setempat. Murdiyansyah (2014: 73) melanjutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan seharusnya difokuskan pada beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyusunan pola penguatan kelembagaan serta manajemen usaha ekonomi masyarakat yang efektif melalui pendekatan kelompok usaha.
2. Penyusunan rekomendasi bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Menyusun *training design* bagi tokoh-tokoh berpengaruh dalam

masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka penyusunan strategi pemberdayaan perlu mendasarkan pada akar masalah yang ditemui dan potensi lokal yang ada. Modal sosial yang ada di masyarakat juga harus menjadi landasan penyusunan strategi pemberdayaan. Selain itu diperlukan juga penguatan kelembagaan terutama dengan pendekatan pemberdayaan secara kelompok. Serta harus dapat menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat yang berpengaruh sehingga dapat memperlancar keberlanjutan pemberdayaan.

Kartasasmita (dalam Cholisin, 2011: 4) menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah. Pertama adalah penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkembang. Hal ini dilakukan dengan memotivasi dan membantu masyarakat dalam menemukan potensi daya yang dapat dikembangkan dari masyarakat. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki masyarakat. Langkah pemberdayaan dapat dilakukan melalui aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, serta penanaman nilai-nilai seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggungjawab. Ketiga adalah upaya pelindungan masyarakat. Langkah ini dilakukan demi melindungi masyarakat dari persaingan yang tidak seimbang dengan pihak lain yang lebih mapan dan kuat, sehingga di sini sangat diperlukan aturan atau kesepakatan untuk melindungi pihak yang lemah.

Kebijakan pemberdayaan terutama pada petani di pedesaan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu berupa kebijakan langsung, kebijakan tidak langsung, dan kebijakan khusus. Kebijakan langsung

dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, perbaikan akses sumber daya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan. Kebijakan langsung dilakukan dengan menyasar penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kemudian kebijakan tidak langsung ditujukan untuk mewujudkan kondisi yang menjamin peningkatan pemerataan, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kebijakan khusus ditujukan pada penyiapan penduduk miskin untuk melakukan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat (Elizabeth, 2007: 36-37).

Pendapat Nasikun yang dikutip Leibo (dalam Cholisin, 2011: 5-6) menjelaskan setidaknya terdapat empat strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan, yaitu strategi pembangunan gotong royong, strategi pembangunan teknikal – profesional, strategi konflik, dan strategi pembelotan kultural. Strategi yang pertama lebih melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial dalam pengertian bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama. Sehingga strategi gotong royong diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen masyarakat yang berlandaskan sifat demokratis, dilakukan atas kekuatan sendiri dan kesukarelaan. Strategi pembangunan teknikal – profesional lebih menekankan perlunya peranan agen pembaharuan dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menyusun langkah kerja dalam merealisasikan program tersebut. Agen perubahan tersebut bisa berasal dari komponen masyarakat sendiri yang terpilih dan dipercaya segenap masyarakat sehingga dalam memecahkan masalah dengan cara

mengembangkan norma, peranan, dan prosedur baru untuk menghadapi situasi yang terus berubah. Strategi yang ketiga yaitu strategi konflik menekankan agar masyarakat dapat mempunyai perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan yang dicapai melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat. Strategi yang terakhir yaitu pembelotan kultural menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju prinsip hidup yang lebih mengutamakan cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh dalam kelompok masyarakat. Hal ini merupakan pembelotan dari kehidupan modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.

Berbagai pendapat terkait strategi pemberdayaan ternyata mempunyai kesamaan yaitu pada upaya mewujudkan masyarakat yang kurang berdaya menjadi lebih sejahtera. Strategi manapun yang digunakan tidak menjadi persoalan asal pilihan tersebut memang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Suatu strategi pemberdayaan yang diterapkan pada masyarakat tertentu bisa direplikasi, tetapi juga belum tentu cocok jika diterapkan di lain masyarakat. Hal ini karena setiap masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda. Sehingga kemampuan pemberdaya dalam menyusun strategi pemberdayaan tidak bisa terlepas dari kemampuan membaca situasi lingkungan dan kondisi masyarakat yang akan diberdayakan.

Secara teknis, upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya contohnya seperti yang dilakukan Setiyanto (2012: 99-108) yang meneliti upaya pemberdayaan kelompok tani padi organik di Boyolali, Jawa Tengah, yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah

strategis, antara lain:

1. Pendampingan

Pendampingan dimaksudkan agar pihak yang diberdayakan tidak merasa sendiri. Selain itu melalui pendampingan maka wawasan dan kemampuan pihak yang diberdayakan akan semakin meningkat melaui pemahaman-pemahaman yang diberikan pendamping. Kuncinya adalah pada keterbukaan informasi baik dari pihak yang diberdayakan maupun pendamping, sehingga dapat menemukan solusi praktis dan tepat sasaran akan masalah yang muncul dalam poses pemberdayaan.

2. Pelatihan

Dengan pelatihan para petani bisa mengembangkan sistem pertanian padi organik yang sedang diberdayakan. Pelatihan juga menambah ketrampilan petani jadi petani bisa mengembangkan ketrampilan yang berhubungan dengan pertanian organik.

3. Bantuan permodalan

Jadi untuk mendukung pemberdayaan para petani organik diberikan bantuan permodalan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian para petani sehingga petani tidak tergantung lagi ke tengkulak karena dengan bantuan modal digunakan kelompok tani untuk membeli peralatan untuk mendukung pertanian padi organik seperti mesin pasca panen. Dengan mempunyai mesin pasca panen sendiri petani melalui kelompok tani dapat mengolah hasil produksi mereka sendiri.

Terkait dengan upaya pemberdayaan petani, diperlukan berbagai kondisi yang mendukung pemberdayaan, salah satunya adalah adanya iklim yang kondusif. Elizabeth (2007: 37) berpendapat bahwa kita harus

memperhatikan bahwa dalam memberdayakan petani perlu memperhatikan terciptanya suatu iklim yang kondusif dan dapat dilakukan dengan cara:

1. Memperbaiki sistem dan mekanisme pemasaran komoditas. Hal ini ditujukan terutama untuk melindungi harga jual pada tingkat petani.
2. Perbaikan persepsi sosial terkait pilihan pekerjaan petani. Hal ini dimaksudkan bahwa pilihan untuk bekerja sebagai petani di desa merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan bernilai kerja. Sehingga pandangan bahwa pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan alternatif dapat diminimalkan dan pada akhirnya dapat mengurangi pandangan negatif serta meningkatkan status sosial petani.
3. Kebijaksanaan dalam adopsi teknologi. Perkembangan teknologi pasti terjadi termasuk dalam bidang pertanian, dampak positifnya juga dapat membantu kehidupan dan memudahkan proses kerja petani. Akan tetapi, adopsi teknologi di sini harus dilakukan dengan selektif agar tidak memudarkan peran petani dan menghilangkan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang telah mengakar dalam kehidupan petani dan bahkan terkadang lebih potensial dalam menjaga kelestarian lingkungan maupun kekayaan nilai-nilai lokal.

Pengabdian yang tim penulis lakukan di Desa Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang merupakan upaya pemberdayaan kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan bibit unggul ruminansia kecil. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani dalam mengupayakan pengembangan bibit ruminansia kecil dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan teknis. Kegiatan tersebut

meliputi, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat/unit usaha ternak, monitoring dan evaluasi, pertemuan teknis kelompok tani, serta *workshop* oleh komunitas. Rangkaian kegiatan dalam program pemberdayaan ini diajukan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan informasi yang holistik mengenai peran kelembagaan kelompok tani dalam memuliakan bibit ruminansia kecil demi mendukung swasembada daging.

Kegiatan pertama, yaitu pelatihan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai peran kelembagaan kelompok tani. Kelembagaan kelompok tani yang berjalan dengan baik dapat mendukung cita-cita bersama untuk kesejahteraan petani/peternak yang tergabung dalam kelompok. Oleh karena itu penguatan kelembagaan petani harus disadari dan diupayakan sebagai fondasi pencapaian tujuan pemberdayaan.

Kegiatan kedua merupakan inti kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan mengadakan kegiatan usaha ternak kambing yang bekerja sama dengan Balai Penelitian Ternak dan Loka Penelitian Kambing Potong. Diharapkan pada 2 RT/ kelompok petani telah menghasilkan inovasi teknologi pemuliaan diantaranya rumpun (*breed*) dan galur (*strain*) baru domba dan kambing hasil penelitian, yang dapat dikategorikan sebagai bibit unggul. Rumpun baru tersebut dapat dikembangkan oleh pengguna untuk meningkatkan efisiensi usaha ternak.

Kegiatan ketiga berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan memberikan kewenangan pada pihak aparatur Desa Sumbermanjing Wetan untuk melakukan monitoring keberlanjutan program. Proses

tersebut akan bersinergi dengan tim petani/peternak dengan Dokter Hewan yang terlibat ketika ada masalah yang terjadi seperti munculnya hama dan penyakit, adanya kambing yang gagal bunting, dan tingkat kebersihan serta kesehatan kandang. Optimalisasi barang-barang limbah juga sangat diperlukan pada sub bagian ini.

Kegiatan keempat adalah pertemuan teknis petani/peternak. Kelompok tani melakukan *sharing* proses yang telah dilaksanakannya, dengan saling berbagi informasi maka akan tercipta modal sosial masyarakat yang saling belajar antara mitra berdaya. Pertemuan ini juga memupuk kemandirian dan kepedulian sehingga masyarakat dapat merumuskan masalah yang dihadapi serta berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pertukaran informasi dalam pertemuan ini diharapkan menjadi jalan untuk mengembangkan usaha ternak yang dilakukan maupun mengatasi masalah yang menghambat.

Kegiatan terakhir yang dijalankan berupa *workshop* oleh komunitas. Kegiatan ini berisi unjuk pendapat tentang mekanisme baru yang digunakan dengan mekanisme konvensional yang biasa dan selama ini dilakukan. Sehingga didapat perbandingan bagaimana kegiatan pemberdayaan dijalankan. Serta bagaimana pencapaian hasil yang diharapkan.

BAB 4
PENTINGNYA KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL DALAM MENUNJANG PEMBERDAYAAN

Upaya pemberdayaan dalam tujuan memaksimalkan potensi serta mengatasi masalah yang ada di masyarakat secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat haruslah mengintegrasikan segala aspek sumber daya yang melingkupi. Sumber daya dalam mendukung upaya pemberdayaan tidak terbatas hanya pada sumber daya manusia, sumber daya alam, modal finansial, ataupun inovasi teknologi. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah peran dari modal sosial di masyarakat yang justru berdampak kuat pada keberhasilan upaya pemberdayaan.

Hasbullah dalam Purnomo (2013: 2) mengungkapkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat, yang mana terkait dengan konsep pemberdayaan, melihat keberhasilan pembangunan dari berbagai aspek *community capital*. Pertama dengan melihat *human capital* yang dapat diperhatikan dari kemampuan personal dalam bidang pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian tertentu, dll. Kedua dengan melihat *natural resources capital* dengan memperhatikan sumber daya alam yang ada. Ketiga dengan melihat *produced economic capital* dengan memperhatikan pengembangan aset ekonomi dan finansial. Keempat dengan melihat *social capital* yang meliputi nilai, norma, *trust*, dan jaringan.

Pemberdayaan pada kenyataannya tidak dapat terlepas dari peran

modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan adat kebiasaan. Sehingga pelaksanaan pemberdayaan tidak selalu didominasi oleh peranan modal alam dan modal ekonomi. Ketiga aspek tersebut mempunyai peran dan karakteristik tersendiri, sehingga pengoptimalan pelaksanaan pemberdayaan juga harus mengoptimalkan peran semua aspek tersebut (Mawardi dalam Yuliarmi, 2011: 3).

Aspek dimensi sosial merupakan gambaran segala sesuatu yang menjadikan masyarakat bersatu berlandaskan rasa kebersamaan dan diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani. Dimensi sosial juga menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran reformasi, dan menetapkan norma serta sanksi sosial yang berlaku di masyarakat dalam kaitannya dengan struktur relasi sosial dan jaringan sosial (Dasgupa dan Serageldin; Coleman dalam Cahyono dan Adhiatma, 2012: 132).

Aspek modal sosial dan aspek lain mempunyai peran masing-masing dan yang terpenting adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan setiap potensi untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Modal sosial sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dibentuk dalam waktu instan layaknya modal finansial yang disuntikkan lembaga pendonor pada masyarakat. Hal ini karena modal sosial mencakup kebiasaan masyarakat serta apa-apa yang menjadi pedoman oleh masyarakat secara turun temurun. Modal sosial juga membentuk persepsi masyarkat dalam kepercayaan menjalin hubungan antar individu atau antar kelompok. Oleh karena itu, peran modal sosial tidak dapat dikesampingkan dalam upaya pemberdayaan. Mengingat bahwa modal sosial tidak dapat dibentuk atau diubah dalam waktu singkat, maka perubahan modal sosial yang tidak mendukung perlu

dilakukan secara perlahan dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Fukuyama (dalam Cahyono dan Adhiatma, 2012: 133) berpendapat bahwa modal sosial sebenarnya merupakan norma dan nilai bersama yang dipedomani serta menjadi acuan masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku serta dibangkitkan oleh adanya kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar sikap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif anggota masyarakat. Wuysang (2014: 6) menambahkan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma yang ada dalam masyarakat serta sebagai suatu bentuk nyata dari suatu institusi yang dinamis. Modal sosial dalam kelompok tani diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, jaringan sosial, tanggung jawab, dan kerja sama.

Upaya penguatan modal sosial di masyarakat menjadi penting karena akan berdampak pada keberhasilan upaya pemberdayaan. Cahyono dan Adhiatma (2012: 142) mengungkapkan bahwa penguatan modal sosial sebagai penunjang upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga sosial yang ada serta memfokuskan pada aspek kepercayaan, *mutual respect*, dan *mutual benefit*, serta harus memperhatikan keragaman nilai dan norma pada masyarakat.

Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menguatkan modal sosial yang ada di masyarakat, dan salah satu caranya dengan melalui lembaga sosial yang telah ada di masyarakat yang akan diberdayakan. Kelompok tani maupun gabungan kelompok tani merupakan lembaga sosial yang dapat dijadikan wadah untuk mengidentifikasi modal sosial yang ada serta bagaimana upaya pengoptimalan serta penguatannya. Wuysang

(2014: 1-2) mengungkapkan bahwa kelembagaan kelompok tani berfungsi sebagai wadah untuk proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan kelompok tani juga diharapkan sebagai salah satu wahana pemeliharaan modal sosial bagi para petani yang dapat berjalan secara berkesinambungan.

Subekti (2015: 5) dalam penelitiannya mengenai internalisasi modal sosial guna meningkatkan dinamika kelompok di salah satu kelompok tani di Kabupaten Jember mengungkapkan bahwa upaya penguatan modal sosial dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan penguatan modal sosial tercermin melalui upaya pemenuhan sarana produksi, pengelolaan air irigasi, pengelolaan hama dan penyakit, penjagaan tanaman, pemasaran hasil pertanian, serta partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan. Penguatan modal sosial sendiri diharapkan dapat bermanfaat untuk mempercepat proses adopsi dan difusi inovasi, mempercepat arus informasi, mewadahi pemecahan masalah petani, mengurangi risiko kegagalan usaha tani, mengurangi konflik, memperkuat kerja sama, serta mendorong persaingan positif dalam budidaya jeruk.

Cahyono dan Adhiatma (2012: 138-139) melakukan penelitian tentang peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan penelitian tersebut diidentifikasikan berbagai lembaga yang terkait, antara lain: Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Koperasi, Kelompok tani, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa lembaga tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai

pokok bahasan ketika pertemuan yang dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Lembaga Desa yang Berkaitan dengan Modal Sosial serta Fokus Pembahasannya

No.	Lembaga	Fokus Pembahasan
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Pertanian, peternakan, pembuatan pupuk organik, harga tanaman pada tingkat petani, kesuburan tanaman tembakau, cara menanam tembakau, cara memupuk tembakau, perkembangan pemerintahan desa, membahas kemajuan pembangunan desa.
2.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Pembangunan jalan, prioritas pembangunan di desa, peningkatan kompetensi SDM desa, membahas program pembangunan desa, rencana kerja desa, dan evaluasi kerja pembangunan desa.
3.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, pemanfaatan pupuk organik dan pupuk cair, pengadaan benih, pupuk, perawatan pembibitan jagung, pengolahan limbah atau kotoran sapi, penyuluhan bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, manajemen panen, pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi, dan evaluasi pinjaman.
4.	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Penyuluhan pola hidup sehat dan bersih, bersih lingkungan, membaca yasin dan tahlil, posyandu, mengatasi gizi buruk, dan peningkatan ketrampilan ibu dan anak.

Sumber: Cahyono dan Adhiatma (2012: 138-139) (*diolah*)

Anggita (2013: 207) dalam penelitiannya di Kabupaten Karawang dan Subang merumuskan konseptualisasi modal sosial dalam mendukung produktivitas pertanian yang ditelaah dalam lima komponen modal sosial. Kelima komponen modal sosial tersebut antara lain, partisipasi, kepercayaan, kerja sama, saling peduli, dan hubungan timbal balik.

1. Partisipasi, merupakan keterlibatan seseorang pada kegiatan tertentu

secara mental dan emosional. Partisipasi dapat dilihat dari keikutsertaan pada kegiatan dan dasar keikutsertaan dengan sukarela karena kesadaran sendiri.

2. Kepercayaan, merupakan perasaan positif untuk berbuat baik kepada orang lain dengan atau tanpa mengharapkan balasan yang dipengaruhi oleh pengalaman terhadap orang lain serta keyakinan akan adanya goodwill dalam diri setiap individu. Kepercayaan dapat dilihat dari hubungan kekerabatan yang erat, tidak adanya perasaan trauma terhadap orang lain, dan perasaan aman untuk menitipkan amanat kepada orang lain.

3. Kerja sama, merupakan kemauan dan kemampuan untuk menjadi bagian kelompok dalam pencapaian tujuan kelompok yang dilakukan secara kooperatif. Kerja sama dapat dilihat dari kesadaran akan tujuan bersama, keterbukaan satu sama lain, kesediaan bertukar informasi, dan pemahaman peran dalam kelompok.

4. Saling peduli, merupakan perhatian terhadap keadaan sekitar yang diterjemahkan sampai pada bentuk tingkah laku. Saling peduli dapat dilihat dari pengetahuan tentang keadaan kerabat sekitar terutama yang sedang dalam kesulitan dan keinginan yang kuat dalam membantu meringankan beban orang lain.

5. Hubungan timbal balik, merupakan suatu hubungan yang berusaha saling membalas kebaikan satu sama lain. Hubungan timbal balik dapat dilihat dari adanya balasan terhadap kebaikan orang lain secara sukarela dan adanya komunikasi dua arah antar pihak yang berkomunikasi yang berlangsung tanpa adanya tekanan.

Sedangkan kesimpulan yang didapati dari penelitian Anggita (2013: 214) ini justru mendapati bahwa modal sosial yang ada pada kedua wilayah penelitian tidak dapat mendukung kinerja usaha tani. Aspek yang menjadi dasar lemahnya modal sosial adalah terkikisnya kepercayaan (*trust*) yang disebabkan trauma finansial masa lalu sehingga menimbulkan saling curiga jika terlibat dalam kegiatan kolektif pertanian terutama yang berkaitan dengan investasi keuangan dalam mendukung usaha tani. Padahal kepercayaan menjadi dasar tahapan kolektivitas sehingga menyebabkan petani-petani sulit dimobilisasi dalam kegiatan yang ditujukan untuk memajukan pertanian karena rendahnya tingkat partisipasi dan kerja sama.

Situmorang, et al., (2012: 114) melalukan penelitian tentang kaitan modal sosial dan keberhasilan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dicermati keberhasilan program PUAP terhadap pendapatan petani dalam kelompok tani yang dilihat dari kenaikan pendapatan yang dinikmati. Akan tetapi perbedaan terjadi pada kelompok tani yang didirikan untuk merespon program PUAP serta kelompok tani yang memang sudah ada sebelum adanya program tersebut. Kelompok tani yang didirikan untuk merespon program, ternyata tidak mampu mendapatkan tambahan pendapatan. Sedangkan kelompok tani yang memang sudah ada sebelum program ditawarkan, ternyata justru dapat menikmati tambahan pendapatan.

Kelompok tani yang pertama dalam penelitian Situmorang, et. al. ternyata memiliki ikatan internal yang kurang kuat karena pembentukannya hanya sekadar memanfaatkan dana dari program, bukan berdasarkan kesamaan kebutuhan dalam usaha tani. Kerja sama

yang terjadi juga bukan dalam hal memecahkan masalah dalam penggunaan dana bantuan program, tetapi diwujudkan dalam bentuk gotong-royong perbaikan kampung, pembersihan kebun, dan lain lain. Pertemuan khusus yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha dalam rangka menyusun rencana budidaya tani yang lebih baik juga tidak dilakukan. Sedangkan kelompok kedua yang terbentuk relatif lebih lama, dibentuk berdasarkan kesamaan kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Pembentukan yang relatif lama, dan pertemuan dengan jadwal yang teratur, dapat menciptakan kepercayaan dalam kelompok ini. Diskusi juga aktif dilakukan dalam pertemuan dengan saling tukar pendapat dan share masalah yang dihadapi untuk kemudian dapat mencari pemecahan atau mungkin dapat menjajaki kemungkinan kerja sama.

Sutopo (2015: 5-6) juga menemukan beberapa permasalahan terkait pengembangan kelembagaan khususnya bagi kelembagaan yang sengaja diciptakan (*enacted institution*). Pertama, penciptaan lembaga yang terbatas hanya berdasarkan untuk memperkuat ikatan horizontal dengan anggota dengan aktivitas yang sama dan tidak banyak mengarah kepada ikatan vertikal. Kedua, pendirian lembaga yang terbatas pada keperluan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, setiap ada program baru maka akan dibentuk lembaga baru bukan bersinergi dengan lembaga yang sudah ada. Ketiga, pembentukan lembaga yang kurang memperhatikan kompleksitas masyarakat tersebut karena lembaga yang dibentuk merupakan replikasi dari *master project* yang berhasil diterapkan di tempat lain. Keempat, pembinaan yang dilakukan pada lembaga baru hanya terbatas pada pengurus kelompok sehingga kurang optimal seperti misalnya mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok. Kelima,

kelembagaan yang dibangun biasanya melalui jalur struktural, sehingga aspek kulturalnya mungkin belum terbentuk, misalnya bagaimana sikap berorganisasi yang baik. Keenam, keyakinan bahwa kelembagaan akan berhasil apabila mempunyai dukungan material yang cukup. Seharusnya tidak hanya demikian karena diperlukan juga cara mengelola kelembagaan dengan sumber daya yang ada dengan manajemen yang baik sehingga berjalan secara optimal.

BAB 5
PENGEMBANGAN GAPOKTAN SEBAGAI KELEMBAGAAN PETANI

Secara konseptual, tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal atau ganda. Berbagai peran yang dapat dimainkan sebuah lembaga adalah sebagai lembaga pengelolaan sumber daya alam (misalnya P3A), untuk tujuan aktivitas kolektif (kelompok kerja *sambat sinambat*), untuk pengembangan usaha (KUA dan koperasi), untuk melayani kebutuhan informasi (kelompok Pencapir), untuk tujuan representatif politik (HKTI), dan lain-lain (Sutopo, 2015: 3-4).

Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Terhadap pedagang saprotan maupun pedagang hasil-hasil pertanian, Gapoktan diharapkan dapat menjalankan fungsi kemitraan dengan adil dan saling menguntungkan. Namun demikian, jika Gapoktan dinilai lebih mampu menjalankan peranannya dibandingkan dengan kios saprodi ataupun pedagang pengumpul, maka Gapoktan dapat menggantikan peranan mereka.

Menurut laporan Deptan (2006), sampai dengan akhir tahun 2006, jumlah kelembagaan petani yang tercatat adalah 293.568 kelompok tani,

1.365 asosiasi tani, 10.527 koperasi tani, dan 272 P4S. Sekarang ini 375 kabupaten/kota atau 86 persen dari total kabupaten/kota mempunyai kelembagaan penyuluhan pertanian dalam bentuk Badan/Kantor/Balai/Sub Dinas/Seksi/ UPTD/Kelompok Penyuluh Pertanian. Sisanya, yaitu 61 kabupaten/kota (14 persen) bentuk kelembagaannya tidak jelas. Sementara itu di Kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang terdepan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pada saat ini dari 5.187 Kecamatan baru terbentuk 3.557 unit (69 persen).

Pembentukan Gapoktan dari sudut pandang ekonomi salah satunya sebagai upaya menghindari biaya transaksi tinggi yang biasanya karena adanya masalah penumpang kepentingan (*free rider*), komitmen, loyalitas, serta faktor eksternal lain (Zakaria; Hermanto dalam Hermanto dan Swastika, 2011: 373). Departemen Pertanian (dalam Wahyuni, 2010: 94) mengungkapkan bahwa pembentukan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kelompok tani. Hal ini dikarenakan pada kelompok tani pada kenyataannya masih mengalami keterbatasan aksesibilitas pada berbagai bidang, misalnya terhadap lembaga keuangan, pemasaran, penyedia sarana produksi, dan sumber informasi. Oleh karena itu, dengan pembentukan Gapoktan, diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah keterbatasan aksesibilitas yang dialami petani.

Sutopo (2015: 1) berpendapat bahwa Gapoktan merupakan lembaga yang dapat berfungsi sebagai penghubung antara petani yang menjadi anggota dengan lembaga lain di luarnya. Berdasarkan fungsi ini, Gapoktan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian,

dan penyediaan informasi yang dibutuhkan.

Sayuti (dalam Wahyuni, 2010: 94) berpendapat bahwa peran yang dijalankan Gapoktan dapat disarikan menjadi tiga peran utama. Pertama, Gapoktan berperan sebagai lembaga sentral yang ditujukan untuk menangani masalah aktivitas kelembagaan petani. Kedua, Gapoktan memiliki peran dalam meningkatkan capaian ketahanan pangan melalui upaya pemberdayaan partisipatif. Ketiga, Gapoktan berperan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Desa (LUEP). Ketiga peran yang dijalankan Gapoktan tersebut didukung oleh organisasi dibawah naungan Departemen Pertanian, yaitu badan Pengembangan SDM Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Ditjen Pengolahan Hasil dan Pemasaran, dan Program KKP.

Kelembagaan telah dijadikan alat yang penting untuk menjalankan program tersebut. Namun demikian, penggunaan strategi pengembangan kelembagaan banyak mengalami ketidaktepatan dan kekeliruan. Berikut diuraikan berbagai permasalahan dalam pengembangan kelembagaan, khususnya bagi kelembagaan yang tergolong ke dalam kelembagaan yang sengaja diciptakan *(enacted institution),* agar dapat dihindari (Syahyuti, 2003):

1. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya adalah agar terjalin kerja sama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka dapat meningkat. Kelompok tani misalnya adalah kelompok orang-orang yang selevel, yaitu pada kegiatan budidaya satu komoditas tertentu. Untuk ikatan

vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, di mana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.

2. Sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat secara nyata. Adalah hal yang lazim, setiap program membuat satu organisasi baru, dengan nama yang khas. Jarang sekali suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada.

3. Menerapkan pola generalisasi, sehingga struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam, meniru bentuk kelembagaan usaha tani padi sawah irigasi teknis di Pantura Jawa (Zuraida dan Rizal, 1993). Hal ini karena pengaruh keberhasilan *pilot project* Bimas tahun 1964 di Subang. Pembentukan kelembagaan kurang memperdulikan kompleks hal-hal abstrak yang ada di masyarakat bersangkutan, yaitu berupa harapan, keinginan, tujuan, prioritas, norma, kebutuhan, dan lain-lain yang sering kali tidak sesuai dengan program yang diintroduksikan. Karena itulah keberhasilan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada petani pekebun lada di Lampung Utara tidak sesukses penerapan program tersebut di Subang Jawa Barat (Agustian *et al.*, 2003).

4. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontak-kontak tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada *social learning approach*.

5. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural,

dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.

6. Pengembangan kelembagaan diyakini akan terjadi jika dukungan material cukup. Sebagai contoh, pengembangan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) dipahami dengan memberikan bantuan traktor, *thresher*, pompa air, dan lain-lain; bukan bagaimana mengelolanya dengan manajemen yang baik.

Pada kenyataannya Gapoktan memiliki peran peting dan fundamental dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gapoktan maupun kelompok tani sebagai wadah utama program pemberdayaan terkait usaha tani dijalankan. Oleh karena itu, pembentukan Gapoktan harus dicermati. Pembentukan Gapoktan dan kelompok tani semestinya mempertimbangkan aspek sosial karena dari berbagai hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa justru aspek modal sosial yang berperan penting terhadap lancar tidaknya program pemberdayaan.

Akan tetapi yang disayangkan tentang pembentukan kelompok tani seperti pendapat Nuryanti dan Swastika (2011: 125) bahwa kelompok tani saat ini kebanyakan dibentuk guna merespon program bantuan pemerintah, bukan lagi atas dasar inisiatif petani dalam memperkuat diri. Program pemerintah tersebut mengharuskan petani bergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Program yang ditawarkan seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi tani, kredit usaha tani bersubsidi, dan lain sebagainya.

Selain masalah klasik bahwa kelompok tani dibentuk secara temporer pada saat ada program bantuan dari pemerintah, ataupun pendonor, Hermanto *et al*., (dalam Hermanto dan Swastika, 2011: 374-375) mengungkapkan masalah rendahnya kinerja kelompok tani dapat disebabkan oleh minimnya kontribusi pengurus, ketidakjelasan anggota, struktur organisasi yang tidak lengkap dan tidak berjalan optimal, rendahnya produktivitas usaha tani, kurangnya pembinaan dari penyuluh, serta kelompok tani belum dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani.

BAB 6
DEFINISI RUMINANSIA DAN JENIS-JENISNYA

Ruminansia merupakan jenis hewan yang biasanya diternakkan oleh manusia dengan karakteristik sebagai hewan memamah biak dan biasanya merupakan hewan herbivora dengan memiliki lambung ganda. Sebagai hewan yang diternakkan, tentu ruminansia dianggap mempunyai manfaat dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung dimanfaatkan atau secara tidak langsung dengan dijual dan ditukarkan barang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seiring perkembangan, maka teknik ternak ruminansia juga terus dikembangkan demi mempermudah kerja manusia dan dengan harapan mendapat hasil yang lebih optimal.

Blakely dan Bade (dalam Fariani, *et al., 2014*: 37) menjelaskan bahwa ternak ruminansia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu golongan ruminansia besar, contohnya seperti sapi dan kerbau. Sedangkan kelompok kedua yaitu ternak ruminansia kecil, contohnya seperti kambing dan domba. Golongan ruminansia besar tentu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan ternak ruminansia kecil, akan tetapi hal tersebut juga diimbangi dengan pola pemeliharaan dan modal yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak sedikit rumah tangga petani yang memilih memelihara golongan ruminansia kecil seperti kambing dan domba sebagai hewan ternak.

Meskipun bagi orang awam kambing dan domba sebagai golongan ruminansia kecil mempunyai kemiripan, sebenarnya keduanya mempunyai

berbagai perbedaan. Perbedaan karakteristik tersebut juga menentukan rumah tangga petani dalam memilih untuk beternak kambing ataupun domba. Berdasarkan sumber makanan yang dimakan, kambing berbeda dengan domba, kambing pada dasarnya adalah ternak pemakan semak, dan domba adalah ternak pemakan rumput (Parasmawati, *et al.*, 2013: 11). Untuk pembahasan berikutnya akan difokuskan untuk membahas golongan ruminansia kecil yaitu kambing.

Menurut MacHugh dan Bradley (dalam Batubara *et al.,* 2012: 3) kambing (*Capra hircus*) merupakan hewan pertama yang didomestikasi, diduga berasal dari kambing liar *Capra aegargus*. Hal ini didasarkan anggapan bahwa pada 10.000 – 11.000 tahun yang lalu di Kawasan Timur Tengah, kambing dipelihara dalam jumlah kecil dan dimanfaatkan susu, daging, dan kotoran sebagai bahan bakar, juga sebagai bahan pakaian dan bangunan yang terbuat dari bulu, tulang, kulit, dan urat daging. Kambing terus menjadi hewan ternak karena dapat membantu masalah kemiskinan di kalangan peternak dengan kemampuan memanfaatkan hijauan dalam jumlah terbatas seperti pada lingkungan yang kritis dan kering.

Menurut Maddox dan Cockett (dalam Batubara *et al.,* 2012: 3), kambing yang dipelihara (*Capra aegagrus hircus*) sebenarnya berasal dari tiga kelompok kambing liar yang telah dijinakkan, yaitu *Bezoar goat* atau kambing liar Eropa (*Capra aegagrus*), kambing liar India (*Capra aegagrus blithy*), dan *Makhor goat* atau Kambing Makhor di pegunungan Himalaya (*Capra falconeri*).

Kambing sendiri juga dapat digolongkan dalam berbagai kategori. Menurut Parasmawati, *et al.,* (2013: 11) untuk menggolongkan kambing

ternak, setidaknya terdapat enam cara yang disepakati yaitu penggolongan berdasarkan asal, kegunaan, ukuran tubuh, bentuk telinga dan panjang telinga. Sedangkan menurut Batubara, *et al.,* (2012: 3) penggolongan kambing biasanya dilakukan berdasarkan perbedaan letak geografis, karakteristik morfologi, dan performa produksi. Apabila dibedakan dari ukuran tubuhnya (karakteristik morfologi), kambing dibedakan atas tiga tipe, yaitu; kambing tipe besar, tipe sedang, dan tipe kecil. Sedangkan pembedaan berdasarkan performa produksi, kambing dibedakan atas kambing tipe perah, tipe pedaging, dan tipe dwiguna (*dual purpose*).

Berdasarkan daerah asal di mana kambing diternakkan, maka kambing yang diternakkan di Indonesia pada saat ini dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut, antara lain ternak asli, ternak impor, dan ternak lokal. Ternak lokal sendiri merupakan ternak yang telah beradaptasi dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga mempunyai karakteristik tersendiri (Batubara, *et al.,* 2012: 5).

FAO (dalam Batubara, *et al.,* 2012: 6) membedakan rumpun ternak kambing menjadi rumpun ternak lokal dan introduksi yang didasarkan pada adaptasi terhadap kondisi lokal. Rumpun kambing lokal dapat dibedakan lagi atas rumpun asli (*indigenous breed, native breed*) dan rumpun tradisional. Rumpun Asli yaitu kambing yang berdasarkan sejarah terbukti berasal dari wilayah tertentu, sedangkan rumpun tradisional yaitu kambing yang berdasarkan sejarah tidak terbukti berasal dari wilayah tersebut tetapi selama 30 – 50 tahun telah diternakkan dan mempunyai catatan silsilah selama lima generasi. Rumpun introduksi (rumpun asing, *exotic, alocthonous*) merupakan kambing yang tidak berasal dari suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang ditentukan selama 30

tahun terakhir.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kambing berdasarkan produk yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu kambing tipe pedaging (penghasil daging), kambing tipe perah (penghasil susu), tipe kambing bulu/mohair/cashmere (penghasil bulu), dan tipe kambing dwi guna (penghasil susu dan daging) (Badan Litbang Pertanian, 2011: 5). Dengan mengetahui penggolongan ini, maka ternak kambing diharapkan dapat dikerjakan dengan lebih optimal. Hal ini karena dengan perbedaan tipe dan karakteristik kambing, tentu akan berbeda juga bagaimana perlakuan peternak terhadap kambing yang diternakkan.

Pengembangan sektor peternakan merupakan suatu hal yang positif untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam ranah rumah tangga peternak maupun berkontribusi secara nyata terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Pakage (2008: 51) berpendapat bahwa pembangunan peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peternak melalui peningkatan pendapatan, memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, meningkatkan gizi, dan mengembangkan agribisnis dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Melihat aspek penting usaha peternakan kambing, maka sudah seharusnya perbaikan dan pendalaman pengetahuan maupun pengembangan inovasi dan teknologi perlu digalakkan dalam mengoptimalkan potensi sektor usaha ternak yang ada.

BAB 7
JENIS KAMBING DI INDONESIA

Berdasarkan berbagai literatur yang diperoleh, ditemukan berbagai jenis kambing yang terdapat dan diternakkan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pembedaan jenis kambing, berbagai jenis kambing tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu untuk diternakkan. Berikut, disebutkan beberapa jenis kambing dengan masing-masing penamaan sesuai literatur yang ditemukan. Kemungkinan penamaan ini akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga yang dapat dijadikan acuan adalah karakteristik kambing-kambing tersebut. Jenis-jenis kambing yang disebutkan pada bab ini merupakan jenis kambing yang umum dipelihara masyarakat indonesia maupun jenis kambing asli indonesia yang bibitnya dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Kambing Kacang

Jenis kambing yang pertama adalah Kambing Kacang. Kambing jenis ini merupakan jenis kambing yang umum diternakkan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Setiadi (dalam Mahmilia dan Tarigan, 2004: 209-210), Kambing Kacang merupakan jenis kambing lokal dengan populasi yang cukup tinggi dan mempunyai penyebaran yang luas. Hal ini mungkin dikarenakan Kambing Kacang memiliki kemampuan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan serta mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi.

Pamungkas *et al.,* (2009: 25-28) juga mengungkapkan bahwa Kambing Kacang bahkan merupakan kambing asli Indonesia yang juga

didapati di negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Kambing Kacang mempunyai kemampuan berkembang biak yang relatif cepat, karena pada umur 15-18 bulan sudah mampu menghasilkan anak. Pemeliharaannya relatif sederhana karena kemampuan kambing ini dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, Kambing Kacang diternakkan untuk dapat dimanfaatkan daging dan kulitnya.

Kambing Kacang mempunyai ciri ukuran tubuh yang relatif kecil dan pendek. Bobot kambing yang mencapai umur dewasa berkisar antara 20-25 kg. Untuk ukuran tubuhnya, Setiadi melaporkan bahwa ukuran tubuh Kambing Kacang jantan dewasa, tinggi pundaknya mencapai 53,80 ± 2,88 cm dan betina dewasa 52,00 ± 7,38 cm. Sedangkan Djajanegara, et. al. melaporkan tinggi kambing jantan mencapai 60-65 cm dan betinanya mencapai 56 cm. Telinga Kambing Kacang berukuran kecil dan berdiri tegak tetapi menggantung. Kambing Kacang juga mempunyai tanduk baik pada kambing jantan maupun betinanya yang berbentuk seperti pedang dan melengkung ke atas sampai ke belakang. Bulu pada Kambing Kacang betina pendek sampai sedang, sedangkan yang jantan memiliki bulu yang agak panjang. Kambing Kacang jantan selalu mempunyai janggut, sedangkan pada betina jarang ditemukan. Kambing Kacang jantan juga memiliki bulu surai panjang dan kasar sepanjang garis leher, pundak, punggung sampai ekor. Warna bulu Kambing Kacang pada umumnya bervariasi antara hitam, cokelat, putih atau kombinasinya. Kambing Kacang juga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dengan kemampuan hidup dari lahir sampai sapih 79,4 persen, sifat prolifik anak kembar dua 52,2 persen, kembar tiga 2,6 persen dan anak tunggal 44,9 persen. Berdasarkan karakteristik tersebutlah mungkin Kambing Kacang

menjadi pilihan umum untuk diternakkan sehingga menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia (Setiadi dalam Mahmilia dan Tarigan, 2004: 209-210; Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122; Pamungkas *et al.*, 2009: 25-28; Batubara, *et al.*, 2012: 14-19).

Untuk merangkum dan mempermudah pemahaman karakteristik Kambing Kacang, berikut ditampilkan tabel yang memuat karakteristik Kambing Kacang secara umum. Selain itu juga ditampilkan foto Kambing Kacang untuk mempermudah visualisasi pemahaman Kambing Kacang.

Tabel 2. Karakteristik Kambing Kacang (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	22	25
2.	Panjang Badan (cm)	47	55
3.	Tinggi Pundak (cm)	55,3	55,7
4.	Tinggi Pinggul (cm)	54,7	58,4
5.	Lingkar Dada (cm)	62,1	67,7
6.	Lebar Dada (cm)	11,6	15
7.	Panjang Tanduk (cm)	7	7,8
8.	Panjang Telinga (cm)	4	4,5
9.	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
10.	Panjang Ekor (cm)	12	12
11.	Lebar Ekor (cm)	2	2,5

Sumber: Pamungkas *et al.* (2009: 27); Batubara, *et al.,* (2012: 15)

Betina

Jantan

Sumber: Pamungkas *et al.*, (2009: 26)

Gambar 1. Kambing Kacang

2. Kambing Boer

Kambing jenis berikutnya dikenal dengan Kambing Boer. Kambing Boer bukan merupakan jenis kambing asli Indonesia, melainkan berasal dari Afrika (Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122). Kambing Boer dikembangkan di Indonesia tentunya dengan alasan karena keistimewaan karakteristik kambing ini. Apabila dibandingkan dengan Kambing Kacang, ukuran tubuh Kambing Boer lebih besar dengan bobot yang lebih berat, sehingga menghasilkan produksi daging yang lebih banyak. Setiadi (dalam Mahmilia dan Tarigan, 2004: 210) mengungkapkan bahwa Kambing Boer dikembangkan di Afrika Selatan untuk keperluan produksi daging dan secara intensif dikembangkan dengan sistem perkawinan lebih dari 50 tahun. Oleh karena itu Kambing Boer dikenal sebagai kambing yang superior sebagai penghasil daging dibandingkan dengan jenis kambing lain.

Kambing Boer memiliki tubuh yang besar dengan tinggi pundak mencapai 50-75 cm untuk kambing jantan dan 60-70 cm untuk kambing betina. Bobot Kambing Boer dewasa dapat mencapai 80-130 kg untuk

kambing jantan dan 50-75 kg untuk Kambing Boer betina. Oleh karena itu Kambing Boer dikenal sebagai kambing pedaging, meskipun pada biasanya Kambing Boer dipotong pada berat badan yang berkisar 35-40 kg untuk jantan dan 30-35 kg untuk betina. Kambing Boer mempunyai ciri lain berupa tanduk yang melengkung ke atas dan ke belakang, telinga yang lebar dan cenderung menggantung, serta hidung cembung atau sangat menonjol. Bulu Kambing Boer relatif pendek sampai sedang dengan pola warna dasar putih dan biasanya terdapat kombinasi warna cokelat pada bagian leher atau kepala. Selain itu, Kambing Boer juga mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi yang memungkinkan untuk mempunyai 3 anak dalam 2 tahun (Setiadi dalam Mahmilia dan Tarigan, 2004: 210; Parasmawati, *et al.*, 2013: 12; Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122). Berikut ditampilkan tabel yang memuat karakteristik Kambing Boer secara umum untuk memudahkan pemahaman.

Tabel 3. Kambing Boer (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	60-70	80-130
2.	Panjang Badan (cm)	74,3	76,5
3.	Tinggi Pundak (cm)	69,6	75
4.	Tinggi Pinggul (cm)	73,6	74,5
5.	Lingkar Dada (cm)	83	86,7
6.	Lebar Dada (cm)	22	26
7.	Panjang Tanduk (cm)	23,5	32,7
8.	Panjang Telinga (cm)	24,5	22
9.	Tipe Telinga	Menggantung	Menggantung
10.	Panjang Ekor (cm)	15	15,5
11.	Lebar Ekor (cm)	7,8	6,5

Sumber: Setiadi dalam Mahmilia dan Tarigan (2004: 211)

3. Kambing Peranakan Etawa (*Etawa Anglo- Nubian*)

Kambing jenis berikutnya disebut dengan kambing Peranakan Ettawah atau sering disebut dengan kambing PE. Seperti namanya, kambing jenis ini merupakan persilangan Kambing Ettawah yang berasal dari India dengan jenis Kambing Kacang dari Indonesia sehingga mempunyai karakteristik perpaduan dari kedua kambing tersebut. Pamungkas *et al.,* (2009: 23-25) mengungkapkan kambing PE merupakan kambing dwiguna karena dapat menjadi kambing pedaging dan kambing perah untuk dimanfaatkan susunya. Kambing PE yang penampilannya cenderung mirip dengan Kambing Kacang disebut dengan Kambing Bligon atau Jawa Randu yang diternakkan sebagai kambing pedaging. Djajanegara dan Miniswaty (2004: 122) mengungkapkan bahwa Kambing Bligon banyak ditemukan di daerah pantai utara Jawa dan Yogyakarta. Kambing Bligon mempunyai ciri khas moncong lancip, telinga yang tebal dan panjang, serta leher tidak mempunyai surai.

Kambing PE mempunyai ukuran tubuh yang sedang dengan tinggi pundak mencapai 84 cm untuk kambing jantan dewasa dan kambing betinanya mencapai tinggi 76 cm. Sedangkan bobot tubuhnya dapat mencapai 60 kg pada kambing jantan dewasa dan 40 kg pada kambing betina dewasa. Selain itu, kambing PE mempunyai ciri pada bentuk mukanya yang cembung melengkung, kaki panjang, telinga panjang menggantung, mempunyai bulu janggut, terdapat gelambir di bawah leher, dan apabila ada yang bertanduk bentuk ujung tanduk tersebut agak melengkung. Kambing PE mempunyai bulu yang pendek, tetapi bagian tertentu seperti di bagian leher, pundak, punggung dan paha, bulunya tumbuh panjang dan tebal. Kambing PE juga merupakan salah satu jenis

kambing yang relatif subur untuk memiliki anak kembar (Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122; Pamungkas *et al.,* 2009: 23-25).

Berikut ditampilkan tabel yang memuat karakteristik Kambing Peranakan Ettawa secara umum dan disertai dengan gambar kambing tersebut untuk memudahkan pemahaman

Tabel 4. Karakteristik Kambing PE (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	40,2	60
2.	Panjang Badan (cm)	81	81
3.	Tinggi Pundak (cm)	76	84
4.	Tinggi Pinggul (cm)	80,1	96,8
5.	Lingkar Dada (cm)	80,1	99,5
6.	Lebar Dada (cm)	12,4	15,7
7.	Panjang Tanduk (cm)	6,5	15
8.	Panjang Telinga (cm)	12	15
9.	Tipe Telinga	Jatuh	Jatuh
10.	Panjang Ekor (cm)	19	25
11.	Lebar Ekor (cm)	2,5	3,6

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 25)

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 24)

Gambar 2. Kambing PE

4. Kambing Marica

Kambing Marica merupakan kambing yang diakui sebagai kambing asli dari Indonesia (FAO dalam Batubara, *et al.,* 2006: 207). Kambing Marica merupakan persilangan lokal kambing di Sulawesi dengan Kambing Kacang, sehingga memiliki postur tubuh kecil dan mirip Kambing Kacang (Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122). Pamungkas *et al.,* (2009 :7-9) mengungkapkan bahwa Kambing Marica terdapat tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan banyak dijumpai di sekitar Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sopheng dan daerah Makassar di Propinsi Sulawesi Selatan. Kambing Marica mempunyai kelebihan yang dapat bertahan di hidup di musim kemarau meskipun hanya memakan rumput kering di daerah yang berbatu. Akan tetapi kabar kurang baiknya bahwa kambing jenis ini dilaporkan FAO sebagai kambing yang termasuk kategori langka dan hampir punah (*endangered*).

Tidak banyak literatur yang mengulas karakteristik Kambing Marica. Kambing ini memiliki ukuran tubuh yang cenderung kecil dengan bobot

kambing jantan dewasa mencapai 22, 8 kg dan kambing betina dewasa mencapai 20,26 kg. Tinggi pundak kambing jantan dewasa mencapai tinggi 57,6 cm, sedangkan kambing betinanya mencapai 55,7 cm. Kambing Marica mempunyai tanduk dengan ukuran kecil, baik yang jantan dan betinanya, dan memiliki bentuk telinga yang tegak (Pamungkas *et al.,* 2009: 7-9). Berikut ditampilkan tabel karakteristik Kambing Marica secara umum disertai dengan gambar untuk memudahkan pemahaman.

Tabel 5. Kambing Marica (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	20,2	22,8
2.	Panjang Badan (cm)	56,4	58,6
3.	Tinggi Pundak (cm)	55,7	57,6
4.	Tinggi Pinggul (cm)	50,6	59,7
5.	Lingkar Dada (cm)	54,4	51,7
6.	Lebar Dada (cm)	15,9	15,6
7.	Dalam Dada (cm)	27,6	23,2
8.	Panjang Tanduk (cm)	7,4	12,1
9.	Panjang Telinga (cm)	10,3	11,6
10.	Lebar Telinga (cm)	6,1	5,9
11.	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
12.	Panjang Ekor (cm)	11,6	11,3
13.	Lebar Ekor (cm)	3,9	3,6

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 9)

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 8)

Gambar 3. Kambing Marica

5. Kambing Gembrong

Kambing Gembrong dapat ditemukan utamanya di bagian timur Pulau Bali terutama di Kabupaten Karangasem (Pamungkas *et al.,* 2009: 20-22). Djajanegara dan Miniswaty (2004: 122) mengungkapkan bahwa Kambing Gembrong mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai rambut putih panjang terutama pada kambing jantan, bahkan dapat mencapai panjang 20-22 cm. Ukuran tubuh Kambing Gembrong tidaklah terlalu besar, tetapi masih lebih besar dibandingkan Kambing Kacang.

Kambing Gembrong jantan dewasa dapat mencapai bobot tubuh hingga 42 kg, sedangkan betina dewasa hanya mencapai 27, 6 kg. Tinggi pundak kambing jantan mencapai 66 cm dan kambing betina dewasa mencapai 64,2 cm. Selain itu, baik kambing jantan maupun betinanya mempunyai tanduk, telinga kecil tegak, leher pendek, dan bentuk muka yang cembung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ciri khusus Kambing Gembrong ada pada bulu panjang terutama yang

dimiliki kambing jantan. Bahkan pada bulu kepala dapat menutupi muka dan telinga kambing tersebut. Sedangkan kambing betinanya memiliki bulu yang pendek yang panjangnya berkisar antara 2-3 cm (Djajanegara dan Miniswaty, 2004: 122; Pamungkas *et al.,* 2009: 20-22).

Untuk memudahkan pemahaman karakteristik Kambing Gembrong, berikut ditampilkan tabel yang memuat karakteristik Kambing Gembrong secara umum. Selain itu, juga disertakan gambar untuk memudahkan visualisasi.

Tabel 6. Kambing Gembrong (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	27,6	42
2.	Panjang Badan (cm)	62,6	71,5
3.	Tinggi Pundak (cm)	64,2	66
4.	Tinggi Pinggul (cm)	66,6	69
5.	Lingkar Dada (cm)	70,9	76,5
6.	Lebar Dada (cm)	14,1	17
7.	Panjang Tanduk (cm)	10,1	18,5
8.	Panjang Telinga (cm)	17,1	18,5
9.	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
10.	Panjang Ekor (cm)	12,1	14,5
11.	Lebar Ekor (cm)	4,1	5

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 22)

Betina

Jantan

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 22)

Gambar 4. Kambing Gembrong

6. Kambing Boerka

Kambing jenis ini dinamakan dengan Kambing Boerka, yang diambil dari Kambing Boer dan Kambing Kacang. Hal ini karena kambing jenis ini merupakan persilangan dari keduanya dengan masing-masing komposisi genotif yang berimbang. Kambing Boerka ditujukan untuk keperluan kambing pedaging. Salah satu keunggulan kambing ini adalah rataan produksi 20-30 persen lebih tinggi dibandingkan Kambing Kacang (Haryono *et al.,* 2011: 11).

7. Kambing Samosir

Kambing Samosir sering disebut juga Kambing Batak dan ditemukan utamanya di Pulau Samosir yang terdapat di tengah Danau Toba, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara. Kambing Samosir beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Pulau Samosir yang cenderung kering dan berbukit. Meskipun demikian, Kambing Samosir dapat bertahan hidup meskipun pada musim kemarau rumput menjadi kering

serta sulit ditemukan (Pamungkas *et. al.,* 2009: 10-13).

Batubara, *et al.,* (2006: 208) mengungkapkan bahwa Kambing Samosir pada mulanya digunakan sebagai pelengkap keperluan adat upacara persembahan keagamaan aliran kepercayaan penduduk setempat. Pada upacara tersebut, Kambing Samosir yang digunakan juga mempunyai ciri tersendiri. Kambing yang digunakan sebagai persembahan harus yang berwarna putih, sehingga penduduk setempat mengutamakan memelihara Kambing Samosir yang berwarna putih.

Kambing Samosir mempunyai ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Berat badan kambing jantan dewasa sekitar 20 kg dan betina dewasa sekitar 26 kg. Tinggi pundak kambing jantan dewasa mencapai 48 cm dan betina dewasa mencapai 50 kg. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ciri khas Kambing Samosir adalah pada warna bulunya yang dominan warna putih. Bahkan warna tanduk dan kuku Kambing Samosir juga berwarna cenderung keputihan (Pamungkas *et al.,* 2009: 10-13).

Berikut disertakan tabel yang merangkum karakteristik Kambing Samosir secara umum dan juga disertai gambar penampakan Kambing Samosir.

Tabel 7. Karakteristik Kambing Samosir (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	26,3	20,1
2.	Panjang Badan (cm)	57,6	52,4
3.	Tinggi Pundak (cm)	50,6	48,3
4.	Tinggi Pinggul (cm)	53,2	50,6
5.	Lingkar Dada (cm)	57,2	51,6
6.	Lebar Dada (cm)	17,7	14,8

No.	Keterangan	Betina	Jantan
7.	Dalam Dada (cm)	28,6	21,4
8.	Panjang Tanduk (cm)	7,6	11,3
9.	Panjang Telinga (cm)	9,4	10,2
10.	Lebar Telinga (cm)	7,5	6,4
11.	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
12.	Panjang Ekor (cm)	10,2	10,3
13.	Lebar Ekor (cm)	3,7	3,4

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 12)

Sumber: Pamungkas *et al,*. (2009: 11)

Gambar 5. Kambing Samosir

8. Kambing Muara

Kambing Muara juga ditemukan di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di daerah Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Keunggulan kambing ini adalah pada tingkat kelahiran yang dapat melahirkan dua sampai empat anak. Meskipun induknya mempunyai anak yang banyak dalam waktu bersamaan, anak Kambing Muara dapat

tumbuh hingga besar dan bahkan terlihat sehat pada saat dilahirkan, tidak berbeda dengan anak kambing tunggal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh produksi susu yang baik dan mencukupi kebutuhan anak yang banyak, bahkan tanpa perlu diberikan susu atau pakan tambahan (Pamungkas *et al.,* 2009: 14-17).

Kambing Muara mempunyai ukuran tubuh yang cukup besar, dengan berat badan kambing jantan dewasa mencapai 68,3 kg dan mencapai 49,4 kg pada kambing betina. Tinggi pundak kambing dewasa bahkan dapat mencapai tinggi 87,6 cm dan kambing betina mencapai 69,7 cm. Sehingga tubuh Kambing Muara terlihat gagah dan tubuhnya kompak. Telinga yang dimiliki kambing ini jatuh terkulai. Sedangkan warna bulunya bervariasi antara cokelat kemerahan, putih dan ada juga berwarna bulu hitam (Pamungkas *et al.,* 2009: 14-17).

Berikut ditampilkan tabel yang berisi karakteristik umum dari Kambing Muara, disertai juga dengan gambar penampakan Kambing Muara.

Tabel 8. Karakteristik Kambing Muara (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	49,4	68,3
2.	Panjang Badan (cm)	75,8	96,3
3.	Tinggi Pundak (cm)	69,7	87,6
4.	Tinggi Pinggul (cm)	72,2	89,2
5.	Lingkar Dada (cm)	84,5	98,7
6.	Lebar Dada (cm)	18,6	38,5
7.	Dalam Dada (cm)	38,7	50,7
8.	Panjang Tanduk (cm)	13,4	27,2

No.	Keterangan	Betina	Jantan
9.	Panjang Telinga (cm)	18,3	19,4
10.	Lebar Telinga (cm)	8,3	8,8
11.	Tipe Telinga	Jatuh	Jatuh
12.	Panjang Ekor (cm)	10,5	9,7
13.	Lebar Ekor (cm)	4,6	5,2

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 16)

(a) Betina

(b) Jantan

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 14-15)

Gambar 6. Kambing Muara

9. Kambing Kosta

Kambing Kosta seperti yang dilaporkan ISA pada tahun 1953 yang dikutip oleh Setiadi et. al., ditemukan di sekitar Jakarta dan Provinsi Banten. Kambing ini diduga merupakan kambing persilangan antara kambing jenis lokal dan kambing jenis impor. Kambing lokal yang dimaksud adalah jenis Kambing Kacang yang diduga dikawinkan dengan rumpun kambing Khasmir/Angora/Etawah (Pamungkas *et al.,* 2009: 17-20).

Kambing Kosta mempunyai ukuran tubuh sedang, dengan berat badan kambing jantan dewasa yang ditemukan mencapai 46,5 kg dan kambing betina dewasa mencapai 24,4 kg. Ukuran tinggi pundak kambing jantan mencapai tinggi 73,5 cm dan betina dewasa mencapai tinggi 56, 9 cm. Kambing ini mempunyai ciri hidung yang rata dan terkadang ada yang melengkung, mempunyai tanduk pendek, dan bulu pendek (Pamungkas *et al.,* 2009: 17-20).

Karakteristik Kambing Kosta selanjutnya secara umum dijelaskan dalam tabel berikut. Disertakan juga gambar yang menunjukkan penampakan Kambing Kosta.

Tabel 9. Karakteristik Kambing Kosta (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	24,4	46,5
2.	Panjang Badan (cm)	60,9	74
3.	Tinggi Pundak (cm)	56,9	73,5
4.	Tinggi Pinggul (cm)	60,5	75
5.	Lingkar Dada (cm)	68,2	83

No.	Keterangan	Betina	Jantan
6.	Lebar Dada (cm)	13,9	21
7.	Panjang Tanduk (cm)	9,4	19,5
8.	Panjang Telinga (cm)	13,8	19
9.	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
10.	Panjang Ekor (cm)	10,3	15,5
11.	Lebar Ekor (cm)	3,7	5

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 19)

(a) Betina

(b) Jantan

Sumber: Pamungkas *et. al.* (2009: 18)

Gambar 7. Kambing Kosta

10. Kambing Benggala

Kambing Benggala juga merupakan jenis kambing persilangan dari kambing lokal dengan rumpun kambing impor. Kambing lokal yang disilangkan adalah Kambing Kacang yang diduga dikawinkan dengan kambing *Black Benggal*. Rumpun Kambing *Black Benggal* diduga dibawa pedagang bangsa Arab yang datang ke daerah sekitar Pulau Timor dan Pulau Flores di Propinsi Nusa Tenggara Timur pada masa sebelum Penjajahan Hindia Belanda (Pamungkas *et al.,* 2009: 28-31).

Kambing Benggala mempunyai ukuran tubuh sedang, di mana kambing jantan dewasa dapat mencapai berat badan sebesar 40 kg dan kambing betina dewasa mencapai 37,9 kg. Ukuran tinggi pundak kambing jantan mencapai 69,7 cm untuk kambing jantan dan 59 cm untuk kambing betinanya. Tipe telinga Kambing Benggala berupa telinga yang menggantung ke samping (Pamungkas *et al.,* 2009: 28-31).

Gambaran mengenai karakteristik Kambing Benggala secara umum selanjutnya dijelaskan dalam tabel berikut dan disertai juga penampakan Kambing Benggala.

Tabel 10. Karakteristik Kambing Benggala (Dewasa)

No.	Keterangan	Betina	Jantan
1.	Bobot (kg)	37,9	40
2.	Panjang Badan (cm)	72,8	77,3
3.	Tinggi Pundak (cm)	59	69,7
4.	Tinggi Pinggul (cm)	62,7	74
5.	Lingkar Dada (cm)	78,3	85,7
6.	Lebar Dada (cm)	62	66,6

No.	Keterangan	Betina	Jantan
7.	Dalam Dada (cm)	31	33,5
8.	Panjang Tanduk (cm)	15,2	14,3
9.	Panjang Telinga (cm)	18	27
10.	Lebar Telinga (cm)	6,3	6,8
11.	Tipe Telinga	Menggantung	Menggantung
12.	Panjang Ekor (cm)	13,2	15,5
13.	Lebar Ekor (cm)	4,8	6

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 31)

(a) Betina

(b) Jantan

Sumber: Pamungkas *et al.,* (2009: 29)

Gambar 8. Kambing Benggal

BAB 8
PENGEMBANGAN USAHA TERNAK RUMINANSIA KECIL

Setelah pada Bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai jenis kambing dan karakteristiknya, pada bab ini akan dilanjutkan dengan beberapa pengembangan pengelolaan ternak ruminansia kecil dengan tujuan mendapat hasil yang optimal. Pengetahuan akan jenis dan karakteristik kambing pada sebelumnya sangat bermanfaat untuk menentukan cara memelihara ataupun memanfaatkan potensi kambing yang diternakkan. Sedangkan pengembangan dalam bentuk perbaikan pengelolaan maupun inovasi dalam bentuk teknologi tentunya juga diperlukan.

Gunardi (dalam Fariani *et. al*, 2014: 37) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangan peternakan, yaitu ternak, sumber daya manusia, sumber daya lahan, dan faktor teknologi. Semua elemen tersebut akan saling berkaitan, sehingga pemahaman potensi dan karakteristik masing-masing elemen diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan usaha ternak ruminansia kecil. Selain itu, juga diharapkan dapat mewujudkan usaha ternak ruminansia kecil yang berlangsung secara berkelanjutan.

Hanafie (2010: 42) menjelaskan bahwa pertanian berkelanjutan setidaknya mencakup empat hal pokok. Pertama, mantap secara ekologis yang diartikan bahwa kualitas sumber daya alam dipertahankan dan peningkatan agrosistem secara keseluruhan mulai dari manusia sebagai pengelola, tanaman dan hewan sampai pada organisme tanahnya.

Kedua, bisa berlanjut secara ekonomis dalam artian petani mendapatkan imbal balik pendapatan yang cukup atas biaya dan tenaga yang dikorbankan. Ketiga, adil yang diartikan bahwa manusia sebagai pengelola harus memberikan penghargaan kepada semua bentuk kehidupan, menghormati martabat dasar semua makhluk hidup, serta menjaga integritas budaya dan spiritualitas masyarakat. Keempat, luwes yang diartikan masyarakat seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus, termasuk pengembangan teknologi dan inovasi.

Mengelola ternak kambing agar berjalan terkendali dan mendapat hasil yang optimal maka diperlukan suatu sistem manajemen yang harus dipahami oleh peternak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait manajemen peternakan kambing agar berjalan baik, antara lain, pertama yang perlu diperhatikan adalah bibit kambing yang diternakkan. Bibit ini sangat berdampak pada kelangsungan usaha ternak karena pertumbuhan kambing akan dipengaruhi bibitnya. Sehingga untuk mengoptimalkan usaha ternak diperlukan bibit yang unggul yang mana peran ini dipegang oleh penyedia bibit. Kedua, pakan ternak yang digunakan. Pada intinya pakan ternak harus mencukupi kebutuhan ternak baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemeliharaan kambing ternak terkait dengan pemberian pakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan digembalakan, di mana pemenuhan gizi pakan akan tergantung dari ternak itu sendiri dan ketersediaan pakan di alam, sedangkan cara lainnya adalah dengan dikandangkan di mana pemenuhan pakan ternak sangat tergantung pada kemampuan peternak. Mengingat keterbatasan lahan gembala dan demi menjaga asupan gizi ternak, pemberian pakan oleh peternak dengan mengandangkan kambing lebih sering digunakan

asalkan dapat mencukupi kebutuhan akan ternak. Ketiga, kesehatan ternak yang perlu diperhatikan oleh peternak dengan teliti. Demi mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan, maka kesehatan ternak memegang peran penting karena jika kambing sakit, maka akan mengganggu pertumbuhan kambing tersebut. Penyakit pada kambing dapat dibedakan menjadi penyakit yang menular dan tidak menular. Penyakit menular biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit darah, cacing dan kutu. Sedangkan penyakit tidak menular biasanya berupa kekurangan gizi, mineral, dan mengkonsumsi tanaman beracun (Badan Litbang Pertanian, 2011: 6-7).

Pada bab ini akan diulas secara singkat pengembangan ternak kambing melalui upaya pemuliaan bibit kambing dan juga penerapan teknologi berupa penggunaan mesin pencacah pakan ternak. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bibit kambing akan berperan pada kesuksesan usaha ternak yang dijalankan. Penggunaan bibit kambing yang terjaga kualitasnya diharapkan dapat menghasilkan hasil ternak yang optimal bagi peternak. Sedangkan mesin pencacah terkait dengan pencukupan pakan ternak. Salah satu permasalahan beternak kambing adalah ketersediaan pakan dalam mencukupi kebutuhan ternak, terutama seperti di musim kemarau dimana pakan ternak berupa hijauan sulit didapatkan. Hal ini dapat dibantu dengan mesin pencacah pakan, di mana pada saat ketersediaan hijauan melimpah pada musim hujan, kelebihan pakan dapat dicacah untuk kemudian disimpan sebagai cadangan pakan.

Setiadi (2007: 3) mengungkapkan bahwa pembibitan ternak merupakan suatu sistem yang cakupannya meliputi subsistem plasma nutfah (sumber daya genetik), pemuliaan, perbanyakan/penangkaran,

pengembangan, pengawasan mutu bibit dan kelembagaannya. Peningkatan produktivitas ternak bertumpu pada dua aspek yang pertama disebutkan, yaitu sumber daya genetik dan pemuliaan. Sumber daya genetik ternak adalah ternak atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk membentuk rumpun/galur/*strain* baru ternak. Sedang pemuliaan ternak merupakan rangkaian kegiatan untuk merubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun ternak guna mencapai tujuan tertentu.

Perbaikan mutu genetik pada ternak dapat berjalan efektif apabila sudah jelas bagaimana parameter genetik yang mempunyai nilai ekonomis, tujuan pemuliaan (*breeding objective*), dan pola pemuliaan (*breeding scheme*). Sedangkan struktur ternak bibit umumnya berbentuk piramida yang terbagi menjadi tiga strata. Pada puncak piramida yaitu kelompok bibit ternak elit (*nucleus*), kemudian kelompok ternak pembiak (*multiplier*), dan terakhir yaitu kelompok bibit ternak niaga (*commercial stock*). Kemudian pola pemuliaan (*breeding scheme*) dalam upaya menghasilkan bibit unggul dalam kaitannya dengan struktur piramida kelompok bibit ternak, dapat dibagi menjadi dua pola yaitu pola inti tertutup dan terbuka. Pola inti tertutup (*closed nucleus breeding scheme*) dimaksudkan bahwa aliran gen bibit ternak berlangsung dari kelompok elit (*nucleus*) sampai ke kelompok pembiak atau niaga. Pola inti terbuka (*Open nucleus breeding scheme)* merupakan pola kebalikan dari pola inti tertutup, dimana aliran gen ternak diperoleh dari hasil seleksi pada tingkat dasar dan dapat berkontribusi pada peningkatan genetik di inti (Rahmat; Warwick et al; Nicholas dalam Ilham et al: 8).

Sakul et al (dalam Setiadi, 2007: 9) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: seleksi diantara dan di dalam rumpun, introduksi rumpun baru, dan persilangan. Seleksi merupakan langkah untuk memilih dengan mempertimbangkan kemampuan beradaptasi, efisiensi reproduksi, dan sifat pertumbuhan dari kambing yang ada. Proses seleksi dapat dilakukan dengan seleksi alam (*natural selection*), yang membiarkan ternak beradaptasi dengan lingkungannya dan menghasilkan jumlah keturunan sebanyak-banyaknya, serta seleksi buatan (*artificial selection*) yang dilakukan dengan campur tangan manusia untuk meningkatkan mutu genetik sifat-sifat ekonomis yang penting. Kemudian upaya introduksi rumpun baru kedalam rumpun lokal yang ada dapat dilakukan dengan cara mengimpor rumpun kambing asing untuk menggantikan rumpun kambing lokal, serta mengimpor rumpun kambing baru untuk disilangkan dengan rumpun kambing lokal. Upaya selanjutnya dengan persilangan, dapat dilakukan dengan penggunaan sumber daya genetik kambing dengan perencanaan sistem perkawinan untuk menghasilkan persilangan yang lebih menguntungkan. Beberapa cara dalam upaya persilangan antara lain, *grading up*, pembentukan rumpun baru dan persilangan spesifik (Setiadi, 2007: 9-14).

Melihat pentingnya posisi pengembangan bibit unggul dalam usaha ternak, maka sudah sepantasnya pengembangan bibit unggul menjadi perhatian peternak dan pemerintah. Tetapi di lapangan, pengembangan bibit unggul masih mengalami berbagai kendala, salah satunya yang dialami oleh badan bentukan pemerintah yang dengan masalah pengembangan bibit unggul di bawah naungan Badan Litbang Pertanian. Haryono *et al.,* (2011: 12) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa

masalah dalam hal pengembangan bibit unggul yang diupayakan oleh Badan Litbang Pertanian. Masalah yang dihadapi seperti terbatasnya jumlah ternak bibit, keterbatasan sifat reproduksi, masih rendahnya nilai jual bibit; dan belum dimanfaatkannya perlindungan hak pemulia (*Breeder's Right*).

Pengelolaan sumber daya genetik ternak merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk mengoptimalkan usaha ternak termasuk ternak ruminansia kecil yang berfokus pada pengelolaan bibit. Pengelolaan sumber daya genetik ternak ini menurut Setiadi (2007: 6) bertujuan untuk:

1. Sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan kekayaan sumber daya genetik ternak secara optimal.
2. Sebagai upaya menambah varian sumber daya genetik ternak dari berbagai sumber termasuk introduksi ternak dari luar negeri.
3. Sebagai upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik ternak asli Indonesia agar tidak dipatenkan pihak asing.
4. Sebagai bahan edukasi dan sumber informasi masyarakat mengenai pentingnya sumber daya genetik.
5. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak.
6. Sebagai pangkalan dalam upaya pembentukan bank nasional sumber daya genetik ternak.
7. Sebagai langkah untuk membantu penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik ternak nasional.

8. Membantu menjaga ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan keragaman sumber daya genetik ternak.
9. Sebagai sarana untuk mendukung dan mengoordinasikan pengelolaan sumber daya genetik ternak di dalam negeri dan bekerja sama dengan negara lain.

Setiadi (2007: 7-8) melanjutkan bahwa masalah penanganan pengelolaan sumber daya genetik lokal harus segera ditangani dengan berbagai langkah nyata. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya pengelolaan sumber daya genetik lokal, antara lain:

1. Mendorong pemerintah agar segera membahas dan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak.
2. Mendorong partisipasi aktif pihak-pihak terkait dengan pembagian tugas yang jelas dalam menyiapkan sistem pengelolaan sumber daya genetik nasional.
3. Menyosialisasikan bagian-bagian dari sistem pengelolaan sumber daya genetik nasional.
4. Menata ulang kebijakan agar lebih mendukung pengelolaan serta konservasi keanekaragaman hayati yang adil dan berkelanjutan.
5. Memulihkan keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan konservasi dan produksi prioritas yang telah terdegradasi.
6. Mengurangi tingkat degradasi lingkungan serta melakukan upaya konversasi terhadap habitat, spesies dan sumber daya genetik guna menopang kesejahteraan masyarakat.
7. Memperkuat jaringan kerja pengelolaan dan konservasi

keanekaragaman hayati antar daerah serta mengembangkan sistem insentif dan mekanisme kompensasi lintas daerah.

8. Meningkatkan tanggung jawab bersama dengan memperkuat penegakan hukum dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik yang adil dan berkelanjutan.
9. Mendukung pengembangan upaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan sistem informasi yang mendukung pengelolaan dan konservasi sumber daya genetik.
10. Mendukung pengembangan basis data, sistem monitoring dan inventarisasi serta jaringan pertukaran informasi yang dapat diakses masyarakat.
11. Mendukung upaya pengembangan dan penerapan teknologi terkait dengan memegang prinsip kehati-hatian dan serta mengakomodasi kreativitas lokal.
12. Revitalisasi, penguatan dan penggalian kembali hukum dan kelembagaan adat/lokal yang mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan berkeadilan.
13. Mendukung upaya kerja sama internasional dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya genetik yang dapat dilakukan dalam bidang pembiayaan, pembagian keuntungan serta alih teknologi tepat guna.

Selain itu, penerapan inovasi baru khususnya pengembangan teknologi sangat ditentukan oleh bagaimana kesiapan dan keterampilan peternak itu sendiri. Beberapa contoh kebiasaan peternak seperti penyediaan pakan dengan cara mencari pakan rumput setiap hari

menyebabkan skala pemilikan ternak menjadi rendah karena akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pakan apabila skala pemeliharaan dibesarkan. Peternak juga belum terbiasa untuk menyimpan pakan sebagai cadangan ketika rumput sulit didapatkan. Kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun sehingga memperlambat pengenalan teknologi baru yang sebenarnya ditujukan untuk mempermudah kegiatan beternak (Haryanto, 2009: 165).

Selanjutnya tentang mesin pencacah Susilo *et al.,* (2012: 34-35), meneliti tentang konsep rancangan yang baik dalam membuat mesin pencacah pakan ternak. Pada penelitian tersebut, dijelaskan tentang pembuatan teknologi mesin pencacah pakan ternak dengan menyusun konsep tentang rancangan mesin serta beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria tersebut, pertama, kemampuan mencacah yang menunjukkan bagaimana kemampuan mesin untuk mencacah pakan ternak dari berbagai jenis pada berbagai kondisi, seperti pada jerami dan rumpun baik dalam kondisi kering atau basah. Kedua kemudahan pengoperasian, hal ini perlu dipertimbangkan agar peternak mudah menggunakan sehingga semakin mudah pengoperasiannya akan semakin baik. Ketiga, kemudahan perawatan, sehingga peternak yang menggunakan tidak terlalu direpotkan dengan urusan perawatan mesin. Keempat, mesin mudah diproduksi, terutama saat penyusunan rancangan mesin hal ini perlu dipertimbangkan agar mudah diperbanyak. Kelima, tingkat kebisingan, sehingga dalam pengoperasiannya dapat memberi kenyamanan bagi peternak. Keenam, tingkat ketahanan, yang diharapkan mesin dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama.

Penelitian Darmawa *et al.,* (2015: 3-6) di Desa Sepang Kabupaten Buleleng mengangkat masalah penelitian tentang harapan petani

kambing yang memerlukan mesin pencacah pakan ternak untuk memotong daun gamal dan lamtoro menjadi ukuran yang lebih kecil (1-3 cm). Hasil potongan ini selanjutnya akan difermentasi sehingga dapat menjadi persediaan ketika tiba musim kemarau dan sulit mendapat pakan ternak, bahkan pada saat itu peternak harus membeli pakan karena sulit mencari di kebun. Kemudian dijelaskan bahwa penggunaan mesin pencacah pakan dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan perbandingan jika secara tradisional dapat mencacah 40-50 kg/hari, sedangkan apabila menggunakan mesin pencacah dapat meningkat menjadi 60-90 kg/hari. Hal ini tentu dapat membantu peternak dalam menjaga ketersediaan pakan bagi ternak yang dipeliharanya.

Inovasi dan teknologi baru untuk mengoptimalkan usaha ternak tidak serta merta dapat langsung diterapkan di masyarakat. Hal ini karena penerapan teknologi juga harus melihat kondisi potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mundy dalam Abdullah (2008: 194) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tahapan yang dilalui masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru, yaitu kesadaran (*awareness*), perhatian (*interest*), penaksiran (*evaluation*), percobaan (*trial*), adopsi (*adopsi*), konfirmasi (*confirmation*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap petani dalam pengadopsian teknologi pertanian yang diterapkan pada sektor usaha tani. Faktor tersebut antara lain, keuntungan nilai tambah dari adopsi teknologi, kecocokan teknologi dengan budaya setempat, hasil penerapan teknologi sebagai pembanding dan dasar peletakan kepercayaan, percobaan keberhasilan teknologi, serta kondisi ekonomi yang ada. Selain itu, adopsi teknologi juga dipengaruhi oleh karakter masyarakat, faktor sosial, ekonomi dan budaya, penampilan dan

kesesuaian teknologi, serta faktor eksternal berupa pelayanan dan kebijaksanaan dari lembaga terkait (Fliegel et al; Maamun et al dalam Abdullah, 2008: 191).

BAB 9
USAHA TERNAK KAMBING BERBASIS PERTANIAN INTEGRATIF

Mengembangkan usaha ternak kambing salah satunya untuk meningkatkan pendapatan peternak dan juga memudahkan peternak dalam menjalankan usahanya. Usaha ternak sendiri seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya perlu memperhatikan berbagai aspek agar usaha ternak dapat berjalan lancar untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak kambing tidak bisa berjalan sendiri dan pada kenyataannya akan saling berkaitan dengan berbagai kondisi yang melingkupinya. Sehingga perlu diperhatikan peternak adalah bagaimana memanfaatkan kondisi sekitar dan relevansinya dengan harapan dapat menunjang usaha ternak yang dijalankan.

Satu hal yang perlu dicoba adalah mengintegrasikan antara usaha ternak dengan usaha tanaman. Memang ini bukan hal yang baru, tetapi mengingat manfaat dan keberlanjutannya sudah sepatutnya hal ini dapat dijadikan solusi dalam pengembangan usaha ternak kambing. Haryanto (2009: 163-164) mengungkapkan bahwa salah satu pengembangan usaha tani yang dapat menambah pendapatan petani yaitu dengan mengintegrasikan antara usaha tani dan ternak. Seperti pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan, serta limbah ternak menjadi pupuk dan energi alternatif yang potensial untuk dikembangkan. Diwyanto dan Haryanto (dalam Haryanto, 2009: 169) menjelaskan bahwa sistem integrasi tanaman-ternak merupakan suatu upaya untuk mengintegrasikan

seluruh komponen usaha pertanian baik secara horizontal maupun vertikal, yang pada intinya tidak ada limbah yang terbuang karena integrasi ini memungkinkan suatu limbah di satu sektor dapat dimanfaatkan di sektor lain.

Diwyanto, *et al.,* (2002: 4) mengungkapkan bahwa harus dipahami juga dari sisi petani bahwa mengintegrasikan tanaman-ternak dapat dijalankan secara berkelanjutan apabila sistem ini dapat memberikan keuntungan bagi mereka, terutama dalam meningkatkan pendapatan maupun perbaikan tingkat kesejahteraan. Peningkatan pendapatan dengan sistem integrasi tanaman-ternak dapat dicapai melalui peningkatan harga jual karena peningkatan mutu produksi atau dengan penghematan biaya produksi yang dikeluarkan.

Ide integrasi antara usaha tani dan ternak menjadi salah satu solusi bukan saja bagi usaha ternak tetapi juga usaha tani dengan hubungan yang saling menguntungkan. Pasandaran *et al.,* (dalam Anugerah *et al.,* 2014: 159) mengungkapkan bahwa sistem integrasi tanaman ternak dapat mendukung upaya pembangunan pertanian di pedesaan. Cirinya adalah adanya keterkaitan yang saling menguntungkan antara usaha tanaman dan ternak yang dapat dilihat dari pembagian lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah masing-masing komponen.

Prinsip keterpaduan dalam Sistem Pertanian Terpadu (SPT) harus memperhatikan beberapa hal, pertama adanya agroekosistem yang beranekaragam memberi jaminan yang lebih tinggi bagi petani untuk usaha yang berkelanjutan. Kedua, diperlukan adanya keanekaragaman fungsional yang dicapai dengan penyesuaian kombinasi jenis tanaman dan hewan yang memiliki sifat saling melengkapi, sehingga dapat

memperbaiki produktivitas hasil pertanian. Ketiga, diperlukan dukungan sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, permodalan, hubungan produk dan konsumen, serta keseimbangan misi pertanian dalam pembangunan. Keempat, sistem pertanian yang kompleks dan terpadu, diciptakan dari pemanfaatan keanekaragaman fungsional secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kelima, produktivitas yang tinggi dapat dicapai dengan kombinasi yang tepat antara tanaman, hewan dan sumber daya lain dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan, tenaga kerja, dan modal (Nurcholis dan Supangkat, 2011: 73).

Haryanto (2009: 171) memaparkan salah satu konsep yang disebut dengan Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah (SITT-BL) yang merupakan strategi usaha tani dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut antara lain, memenuhi kebutuhan konsumen, memperkuat sumber pendapatan peternak, memperkecil risiko kegagalan beternak, pemanfaatan hubungan sinergis tanaman-ternak, menyediakan bioenergi untuk keperluan rumah tangga, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep lain yang terkait dengan integrasi tanaman dan ternak yaitu yang dikenal dengan Simantri. Dinas Pertanian Tanaman Pangan (dalam Anugerah *et al.,* 2014: 158) menjelaskan bahwa Simantri merupakan kegiatan integrasi dalam arti luas yang diintroduksikan pada usaha tanaman pangan, palawija dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan pada suatu wilayah tertentu. Sasaran dicetuskannya program Simantri ialah untuk mencapai peningkatan luas tanam, peningkatan jumlah ternak, peningkatan perikanan dan kualitas hasil perikanan. Selain itu, dengan adanya Simantri diharapkan akan

tersedianya pakan ternak yang berkualitas sepanjang tahun, tersedianya pupuk dan pestisida organik, serta tersedianya energi ramah lingkungan berupa biogas. Sehingga Simantri ini berorientasi pada usaha pertanian yang menuju pertanian tanpa limbah dan menghasilkan 4F (*food, feed, fertilizer,* dan *fuel*). Secara sederhana dapat digambarkan secara teknis dengan adanya integrasi dalam program Simantri, limbah tanaman dapat diolah untuk pakan ternak dan dapat disimpan sebagai cadangan pakan sewaktu musim kemarau dimana cukup sulit untuk mendapatkan pakan ternak, serta sisi sebaliknya dari limbah peternakan berupa kotoran dan urine ternak dapat diolah menjadi biogas, biourine, pupuk organik, dan biopestisida.

Wisnuardhana dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan (dalam Anugerah *et al.,* 2014: 161) mengungkapkan bahwa sasaran kegiatan Simantri ditujukan pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari desa yang memiliki potensi pertanian dengan memiliki produk unggulan sebagai titik ungkit. Sedangkan indikator keberhasilan pencapaian program Simantri dapat dilihat dari perkembangan kelembagaan dan SDM baik petugas pertanian maupun petani, lapangan kerja baru dari pengembangan diversifikasi usaha, berkembangnya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani, terciptanya pertanian organik, berkembangnya lembaga usaha ekonomi pedesaan, dan peningkatan pendapatan petani.

Selain itu, Devendra (dalam Diwyanto *et al.,* 2002: 2) menjelaskan tentang salah satu konsep integrasi lain yang disebut dengan *crop-livestock system* (CLS). CLS juga menerangkan tentang konsep integrasi antara usaha tani dan ternak. Penerapan CLS mempunyai tujuan guna diversifikasi sumber daya produksi, mengurangi risiko, efisiensi tenaga kerja, efisiensi penggunaan komponen produksi, mengurangi

ketergantungan energi kimia, menciptakan sistem ekologi yang lebih lestari dengan mengurangi polusi, meningkatkan produksi, dan mengembangkan rumah tangga petani yang lebih stabil.

Priyanti yang mengutip pendapat Devandra (dalam Anugerah *et. al.*, 2014: 165) menyebutkan bahwa setidaknya dapat ditemukan delapan keuntungan jika menerapkan pola integrasi antara tanaman dan ternak. Keuntungan tersebut antara lain adanya diversifikasi penggunaan sumber daya produksi, mengurangi terjadinya risiko usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan input produksi, mengurangi ketergantungan energi kimia, sistem teknologi yang lebih lestari dan ramah lingkungan, meningkatkan hasil produksi, serta mampu mengembangkan usaha rumah tangga petani yang berkelanjutan.

Berbagai konsep integrasi seperti yang sudah diuraikan, salah satunya menempatkan limbah ternak berupa kotoran ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk sektor usaha tanaman. Limbah ternak terutama ternak kambing, agar dapat memberi manfaat yang optimal harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Mathius (1994: 3-4) menjelaskan bahwa pengolahan kotoran kambing agar dapat digunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem pengolahan terbuka dan sistem pengolahan tertutup. Pertama, sistem pengolahan terbuka merupakan cara yang lebih mudah dilakukan yang biasanya kotoran dibiarkan dalam beberapa waktu tertentu (+ 3 bulan) dalam lubang penampung yang disiapkan di bawah kandang ternak. Cara ini mempunyai keunggulan karena lebih murah karena tidak banyak menyita waktu dan tenaga. Penggunaan pupuk kandang ini dapat dilakukan dengan cara menebarkan langsung di sekitar tanaman atau dengan cara membenamkan di tanah di sekitar tanaman. Kedua, sistem pengolahan

tertutup dilakukan dengan cara menyiapkan tempat penampungan khusus dan disarankan agar dinding dan lantai bak penampungan terbuat dari bahan yang tidak rembes air. Pengolahan dengan sistem tertutup tidak hanya mengolah kotoran ternak, tetapi juga termasuk urine dan sisa pakan ternak. Selanjutnya bak penampungan tersebut ditutup dengan tanah kurang lebih 30 cm dan diberikan tempat naungan sederhana agar tidak tergenang air. Hal ini bertujuan agar mencegah hilangnya unsur hara seperti nitrogen. Sama seperti sistem terbuka, sistem tertutup juga harus menunggu dalam waktu tertentu (+ 3 bulan) agar pupuk kandang siap digunakan. Cara penggunaannya juga sama, bisa langsung ditebar atau dibenamkan di sekitar tanaman untuk hasil yang lebih optimal.

Limbah ternak kambing berupa kotoran kambing yang diolah menjadi pupuk kandang ternyata mempunyai keunggulan tersendiri bagi tanah sebagai media tanam yang kemudian dapat bermanfaat bagi tanaman. Soepardi (dalam Diwyanto *et al.,* 2002: 2) mengungkapkan kelebihan dari pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak ternyata dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Perbaikan aerasi tanah dan peningkatan unsur hara yang terikat dengan koloid tanah yang selanjutnya akan memperbaiki nisbah karbon terhadap nitrogen dalam tanah. Sehingga pemberian pupuk organik ini sebenarnya merupakan suatu keharusan dan bukan merupakan suatu alternatif. Senada dengan yang diungkapkan Soepardi, Jacobs (dalam Mathius, 1994: 4) berpendapat bahwa pupuk dari kotoran kambing digunakan karena memiliki kualitas yang baik dengan mengandung unsur hara dengan urutan kedua setelah feses ayam. Campuran feses, urine, jerami tanaman, dan sisa pakan merupakan bahan yang bagus sebagai bahan pupuk kompos. Campuran tersebut mempunyai keunggulan yaitu dapat

meningkatkan jumlah humus tanah yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat dan menyimpan air serta membantu menjaga komponen hara untuk dapat berada di lapisan tanah bagian atas sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tanaman.

Salah satu penelitian yang menunjukkan perbedaan penggunaan pupuk kandang dari kotoran kambing adalah penelitian yang dilakukan Thamrin *et al.,* pada 1991 (dalam Mathius, 1994: 5). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang dari kotoran kambing dapat meningkatkan 21% rataan hasil pipilan jagung dibandingkan dengan produksi pipilan jagung dengan menggunakan pupuk kimia. Oleh karena itu, melihat manfaat dan kelebihan pupuk kandang dari kotoran kambing maka pengaplikasian integrasi antar usaha ternak dan usaha tani patut dipertimbangkan.

BAB 10
PENTINGNYA PERAN STAKEHOLDERS TERKAIT

Tujuan upaya pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan optimal jika tidak terdapat sinergi dari pihak-pihak yang berkaitan. Meskipun masalah dan potensi masyarakat telah teridentifikasi, juga telah ditemukan strategi penguatan masyarakat, hal ini belum cukup jika tidak disertai partisipasi yang memadai dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak ini perlu diidentifikasi serta bagaimana perannya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sehingga upaya pemberdayaan menjadi langkah bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Pihak-pihak yang terkait upaya pemberdayaan masyarakat dapat disebut dengan istilah *stakeholder* atau juga pemangku kepentingan. Gonsalves et al dalam Iqbal (2007: 90) mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan merupakan pihak yang memberi atau menerima dampak atas suatu kebijakan, program, atau aktivitas pembangunan. Setiap kelompok pemangku kepentingan mempunyai sumber daya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pembangunan.

Stakeholder atau pemangku kepentingan seperti yang dijelaskan merupakan pihak-pihak yang memberi atau menerima dampak dari upaya pemberdayaan masyarakat yang berasal dari berbagai elemen terkait. Identifikasi diperlukan karena setiap pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama yang terkait dengan pengembangan ternak ruminansia kecil mempunyai karakteristik berupa

sumber daya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perlunya sinergi antar berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar setiap potensi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan kebutuhan dapat terwakilkan dapat proses pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Crosby dalam Iqbal (2007: 90) membedakan pemangku kepentingan menjadi tiga kelompok. Pertama pemangku kepentingan utama, yaitu pihak yang menerima dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan. Kedua, pemangku kepentingan penunjang, yaitu pihak yang menjadi perantara dalam kegiatan. Ketiga, pemangku kepentingan kunci, yaitu pihak yang mempunyai pengaruh kuat terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Berdasarkan pembagian tersebut dapat dipahami upaya identifikasi pemangku kepentingan harus melihat derajat keterkaitan peran pihak pemangku kepentingan dalam upaya pemberdayaan. Seperti contohnya, pemangku kepentingan utama adalah kelompok tani ternak ruminansia kecil yang langsung menerima dampak dari upaya pemberdayaan masyarakat. Kemudian pemangku kepentingan penunjang adalah akademisi sebagai perantara pengetahuan dan teknologi untuk disalurkan kepada kelompok tani ternak ruminansia kecil. Pemerintah maupun lembaga donor dapat dikategorikan sebagai pemangku kepentingan kunci melalui bantuan yang dapat diberikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Beberapa permasalahan pemberdayaan terkait peran akademisi dan praktisi pemberdayaan seperti lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), paling tidak dapat diketahui dua permasalahan utama. Pertama, kesenjangan yang terjadi antara akademisi yang cenderung lebih

mempunyai kebebasan dan kesempatan dalam akses informasi melalui literatur, diskusi, dan penelitian tentang berbagai teori pemberdayaan. Sedangkan praktisi pemberdayaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya lebih cenderung mempunyai intensitas tinggi dalam aksi pemberdayaan meskipun dengan bekal akses yang kurang terhadap pemahaman teori pemberdayaan yang dapat menjadi bentuk perubahan sosial. Kedua, selanjutnya akibat ketidaksinambungan tersebut maka terjadilah perbedaan antara tujuan teoritis yang dikawal oleh akademisi dengan tujuan praktis yang dilakukan oleh para praktisi, hal ini karena praktisi kurang dilandasi pemahaman teoritis dan visi ideologis tentang perubahan sosial yang dapat diwujudkan melalui proses pemberdayaan masyarakat (Fakih dalam Faizal, 2015: 41).

Iqbal (2007: 90) dalam penelitiannya tentang analisis pemangku kepentingan dan perannya dalam pembangunan pertanian mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam lingkup luas dan lingkup yang lebih sempit. Dalam lingkup luas, pemangku kepentingan yang terlibat antara lain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta dan komunitas. Secara lebih sempit, pemangku kepentingan yang terlibat mencakup aparat pemerintah baik lokal maupun nasional, peneliti, penyuluh, petani, pedagang yang terkait usaha tani, penyedia jasa yang berkaitan dengan usaha tani, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sedangkan Noor (2011: 98) mengungkapkan bahwa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan dilakukannya pemberdayaan, maka perlu melibatkan elemen terkait. Elemen terkait yang dimaksudkan Noor dalam pemberdayaan antara lain:

1. Peran pemerintah dengan dukungan yang dapat dilakukan terkait

pengelolaan birokrasi pemerintah yang mengakomodir upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam hal membangun partisipasi masyarakat, membuka dialog dengan masyarakat, dan menerbitkan peraturan yang memihak kepada masyarakat yang kurang berdaya.

2. Organisasi kemasyarakatan yang berada di luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan baik lokal maupun nasional.
3. *Local Community Organization* yaitu lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat, contohnya seperti BPD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Gapoktan, dan lain sebagainya.
4. Koperasi sebagai bangun usaha sebagai wadah ekonomi rakyat.
5. Pendamping dalam proses pemberdayaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan diri dan kelompoknya.
6. Pemberdayaan yang dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan dengan pendekatan *bottom up*.
7. Partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan penelitian Setiyanto (2012: 90-95) tentang pemberdayaan kelompok tani padi organik di Desa Dlingo, Kabupaten Boyolali mengungkapkan bahwa pihak yang berkaitan dengan pemberdayaan, yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Pemerintah, dan Kelompok Tani. LSM mempunyai peran berupa pemberian sosialisasi dan merupakan pihak yang pertama kali melakukan pemberdayaan. Dinas pemerintah berperan dalam melakukan

pendampingan, pelatihan, dan bantuan modal kepada kelompok tani. Sedangkan kelompok tani sendiri mempunyai peran untuk melanjutkan pelatihan yang sebelumnya sudah dilakukan LSM maupun dinas pemerintah.

Sugiri (2012: 60) melanjutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila peran *community worker* (pendamping), berjalan dengan baik. Pendamping tersebut baik dari lembaga-lembaga pemerintah *(government institutions)* ataupun pendamping dari lembaga-lembaga non pemerintah *(non-government institutions)*. Sedangkan peran yang dapat dijalankan oleh *community worker* tersebut setidaknya mencakup peran pemercepat perubahan *(enabler)*, perantara *(broker)*, pendidik *(educator)*, tenaga ahli *(expert)*, perencana sosial *(social planner)*, advokat *(advocate)*, dan aktivis *(activist)* (Aldi dalam Sugiri, 2012: 60).

Dari berbagai pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah juga mempunyai peran penting. Koho (2016: 7-8) mengungkapkan bahwa pemerintah khususnya pemerintah desa mempunyai peran penting dalam upaya pemberdayaan. Setidaknya terdapat tiga peran utama dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah berperan sebagai regulator. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penerbitan berbagai peraturan yang terkait upaya pemberdayaan di mana dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai dinamisator. Pemerintah berperan dalam menggerakkan partisipasi berbagai pihak ketika proses pembangunan yang berjalan ternyata stagnan. Kegiatan efektif yang dapat dilakukan pemerintah seperti

melakukan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat. Ketiga, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, termasuk mengkondisikan suasana yang aman dan nyaman.

Susanti (2015: 910-911) melakukan penelitian tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam melakukan upaya pemberdayaan di Desa Sukamaju, Kecamatan Tenggarong Seberang dan menyimpulkan bahwa pemerintah desa setidaknya melakukan enam peran utama dalam upaya pemberdayaan. Peran pemerintah desa yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut, yaitu:

1. Animasi sosial, merupakan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pertanian untuk pemberdayaan masyarakat. Pada lokasi penelitian, peran ini dianggap kurang maksimal dijalankan oleh pemerintah desa.
2. Mediasi dan negosiasi, merupakan peran pemerintah desa dalam bertindak sebagai mediator ketika terjadi konflik dalam kegiatan pertanian. Pada lokasi penelitian, peran ini dilakukan oleh kepala desa di mana penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah serta mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak yang berkonflik.
3. Pemberian dukungan, merupakan peran pemerintah desa yang memberikan dukungan pada kegiatan pembangunan pertanian. Peran dijalankan pada lokasi penelitian terutama diberikan dengan dukungan bangunan fisik berupa pembangunan gorong-gorong dan pengerasan jalan terkait usaha tani.

4. Fasilitasi kelompok, merupakan peran yang dilakukan pemerintah dalam hal memfasilitasi kegiatan usaha tani. Peran ini dilakukan dengan fasilitasi pengadaan sarana produksi tani melalui Gapoktan, pengadaan tanaman hijau keluarga melalui PKK, pembuatan lumbung kelompok tani dan pengadaan teknologi *hand traktor*.

5. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, merupakan peran pemerintah desa dalam mendukung potensi yang dimiliki petani untuk mendukung upaya pemberdayaan. Peran ini pada lokasi penelitian dilakukan dengan pemberian pelatihan terkait pengembangan potensi usaha tani, meskipun peran ini kurang optimal karena belum menjangkau seluruh dusun pada desa tersebut.

6. Mengorganisasi, merupakan peran pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. Peran ini dijalankan pemerintah desa di lokasi penelitian dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Pemangku kepentingan sebagai kelompok pemangku kepentingan perantara, salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kaitannya dengan orientasi pemberdayaan masyarakat dengan pola transformatif, dilakukan melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok swadaya lokal, sehingga LSM dianggap mampu berperan optimal dalam mengembangkan masyarakat. Beberapa peran LSM dalam mendukung kelompok swadaya di masyarakat antara lain (Relston dalam Mursitama, 2011: 70):

1. Identifikasi kelompok lokal dan strategi pemenuhan kebutuhan kelompok.
2. Berperan dalam memobilisasi dan agitasi kelompok masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang dalam mencapai sasaran pembangunan secara umum.
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pedesaan.
5. Membantu mengatur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencapaian pembangunan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Agustina. 2008. Peranan Penyuluhan dan Kelompok Tani Ternak untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi dalam Peternakan Sapi Potong. Makalah Prosiding Seminar Nasional Sapi Potong - Palu, 24 November 2008: 188-195. Diakses dari peternakan.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23 WIB.

Agustian, A., Supena F., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. *Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung*. Bogor: Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Andriyani, Agung Istri Andriyani, E. Martono, dan Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional* 23 (1): 1-16.

Anggita, Tiara. 2013. Dukungan Modal Sosial dalam Kolektivitas Usaha Tani Untuk Mendukung Kinerja Produksi Pertanian, Studi Kasus: Kabupaten Karawang dan Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 24 (3): 203 – 226.

Anugrah, Iwan Setiajie, S. Sarwoprasodjo, K. Suradisastra, dan N. Purnaningsih. 2014. Sistem Pertanian Terintegrasi – Simantri: Konsep, Pelaksanaan dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian Di Provinsi Bali. *Artikel Ilmiah* Forum Penelitian Agro Ekonomi 32 (2): 157 – 176.

Badan Litbang Pertanian. 2011. *Inovasi Ternak dan Kultur Jaringan Menambah Pendapatan Petani*. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Batubara, Aron, F. Mahmilia, I. Inounu, B. Tiesnamurt, H. Hasinah.

Rumpun Kambing Kacang di Indonesia. *Publikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2012*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 16 November 2107 pukul 17.23 WIB.

Batubara, Aron, M. Doloksaribu, dan B. Tiesnamurti. 2006. Potensi Keragaman Sumberdaya Genetik Kambing Lokal Indonesia. *Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 14.02 WIB.

Cahyono, Budhi dan A. Adhiatma. 2012. Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management (CBAM)* 1 (1): 131-144.

Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011*. Diakses dari http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/PEMBERDAYAAN+MASYARAKAT.pdf pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.23 WIB.

Darmawa, I Putu. I M. Sudana, I M. Aryana. 2015. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Berupa Mesin Pencacah Pakan Ternak Kambing di Desa Sepang Kabupaten Buleleng. *Bhakti Persada: Jurnal Aplikasi Ipteks* 1 (1): 81-88. Diakses dari http://ojs.pnb.ac.id/index.php/BP/article/view/251 pada tanggal 30 November 2017 pukul 15.10 WIB.

Deptan. 2006. *Bahan Rapat Kerja Deptan dengan DPD-RI, tanggal 19 Juni 2006*. Deptan, Jakarta.

Diwyanto, Kusuma, B. R. Prawiradiputra, dan D. Lubis. 2002. Integrasi

Tanaman-Ternak dalam Pengembangan Agribisnis yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berkerakyatan. *Jurnal Wartazoa* 12 (1): 1-9. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/semnas/pronas01-2.pdf?secure=1 pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 11.26 WIB.

Djajanegara, Andy dan Artaria Misniwaty. 2004. Pengembangan Usaha Kambing dalam Konteks Sosial-Budaya Masyarakat. *Lokakarya Nasional Kambing Potong*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/prokpo04-11.pdf?secure=1 pada tanggal 16 November 2017 pukul 17.34 WIB.

Elizabeth, Roosganda. 2007. Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani di Pedesaan yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 25 (1): 29 – 42. Diakses dari http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3963 pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 15.51 WIB.

Faizal. 2015. Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ijtimaiyya* 8 (1): 35-51. Diakses dari http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/861 pada tanggal 16 November 2017 pukul 15.30 WIB.

Fariani, A, S. Susantina, dan Muhakka. 2014. Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Berdasarkan Ketersediaan Lahan Hijauan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. *Jurnal Peternakan Sriwijaya* 3 (1): 37-46. Diakses dari http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/peternakan/article/view/1722 pada tanggal 16 November 2017 pukul 16.45 WIB.

Hadi, Agus Purbathin. 2009. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. *Artikel Ilmiah:* 1-14. Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/86913/potongan/S1-2015-317906-bibliography.pdf pada tanggal 16 November 2017

pukul 15.28 WIB.

Hanafie, Rita. 2010. Penyediaan Pangan yang Aman dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan. *J-SEP* 4 (38): 38-43. Diakses dari https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/395 pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 11.11 WIB.

Haryanto, Budi. 2009. Inovasi Teknologi Pakan Ternak dalam Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Bebas Limbah Mendukung Upaya Peningkatan Produksi Daging. *Pengembangan Inovasi Pertanian* 2 (3): 163-176. Diakses dari http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/ip023091.pdf pada tanggal 2 Januar 2018 pukul 11.17 WIB.

Haryono, B. Tiesnamurti, B. Setiadi, S.P. Ginting, dan C. Talib. 2011. Penyediaan Bibit Unggul Ruminansia Kecil yang Dihasilkan Badan Litbang Pertanian. *Workshop Nasional Diversifikasi Pangan Daging Ruminansia Kecil*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/index.php/workshop-nasional-diversifikasi-pangan-daging-ruminansia-kecil-tahun-2011/4016-penyediaan-bibit-unggul-ruminansia-kecil-yang-dihasilkan-badan-litbang-pertanian pada tanggal 16 November 2017 pukul 16.45 WIB.

Hermanto dan D. K.S. Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 9 (4): 371-390. Diakses dari http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4203 pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.40 WIB.

Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Naskah Bappenas* No. 20: 1-11. Diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi__20091015151035__2384__0.pdf pada tanggal 20 November 2017 pukul 17.36 WIB.

Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian* 26 (3): 89-99. Diakses dari pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.28 WIB.

Koho, Fergie C.S.G. 2016. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif* 1 (7): 9-10. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/7671 pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 15.02 WIB.

Langi, Jova Jalinsri Engelina. 2015. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico* 2 (6): 1-11. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/9554 pada tanggal 16 November 2017 pukul 15.33 WIB.

Mahmilia, Fera dan A. Tarigan. 2004. Karakteristik Morfologi dan Performans Kambing Kacang, Kambing Boer dan Persilangannya. *Lokakarya Nasional Kambing Potong*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/prokpo04-23.pdf pada tanggal 16 November 2017 pukul 17.22 WIB.

Mathius, I-Wayan. 1994. Potensi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Asal Kotoran Kambing – Domba. *Jurnal Wartazoa* 3 (2-4): 1-8. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/wartazoa/wazo32-4-1.pdf?secure=1 pada tanggal 30 November 2017.

Mosher, AT. 1987. Menggerakkan Dan Membangun Pertanian. Jakarta: Yasaguna.

Munandar, Aris. 2008. Peran Negara dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Poelitik* 4 (1): 151-162. Diakses

dari http://sps.unas.ac.id:8080/publikasi/P%20151-162%20Peran%20Negara.pdf pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.39 WIB.

Murdiansyah, Isnan. 2014. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal Wiga* 4 (1): 71-92. Diakses dari http://journal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/JPWIGA/article/view/52 pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.24 WIB.

Mursitama, Tirta Nugraha. 2011. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Diakses dari www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 20.00 WIB.

Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS* I (2): 87-99. Diakses dari journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/591/541 pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.23 WIB.

Nurcholis, M. dan G. Supangkat. 2011. Pengembangan Integrated Farming System untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian| Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, *Bengkulu 7 Juli 2011*. Diakses dari http://repository.unib.ac.id/121/ pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 10.58 WIB.

Nuryanti, Sri dan D. K.S. Swastika. 2011. Peran Kelompok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Artikel Ilmiah Forum Penelitian Agro Ekonomi* 29 (2): 115 – 128. Diakses dari http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/3896 pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.02 WIB.

Pakage, Stepanus. 2008. Analisis Pendapatan Peternak Kambing di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Peternakan* 3 (2): 51 – 57. Diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=101922&val=1609 pada tanggal 16 November 2017 Pukul 17.17 WIB.

Pamungkas, Fitra Aji, A. Batubara, M. Doloksaribu, E. Sihite. 2009. *Petunjuk Teknis Potensi Beberapa Plasma Nutfah Kambing Lokal Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Diakses dari http://lolitkambing.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/juknisplasmanutfah.pdf pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 13.45 WIB.

Parasmawati, F.Suyadi, dan S. Wahyuningsih. 2013. Performan Reproduksi pada Persilangan Kambing Boer dan Peranakan Etawah (PE). *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* 23 (1): 11 – 17. Diakses dari http://jiip.ub.ac.id/index.php/jiip/article/view/122 pada tanggal 16 November 2017 pukul 17.23 WIB.

Purnomo, Daru. 2013. *Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Disajikan dalam Seminar Nasional "Masyarakat Maritim Di Indonesia: Kendala, Peluang dan tantangan pengembangan" yang diselenggarakan dalam Rangka Konferensi Nasional Sosiologi II Kerjasama Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia dengan Jurusan Sosiologi Fisipol Universitas Hasanuddin Makasar pada tanggal 12-14 November 2013. Diakses dari ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M0109 pada tanggal 29 November 2017 pukul 19.01 WIB.

Rahayu, Mg Ana Budi. 2014. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Diakses dari http://www.infodiknas.com/wp-content/uploads/2014/12/PEMBANGUNAN-PEREKONOMIAN-NASIONAL-MELALUI-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DESA.pdf pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 18.21 WIB.

Saragih, Bungaran. 2003. *Membangun Sistem Agribisnis*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.

Setiadi, Bambang. 2007. Strategi Perbibitan Kambing/Domba di Indonesia. *Lokakarya Nasional Domba dan Kambing: Strategi Peningkatan Produksi dan Mutu Bibit Domba dan Kambing*. Diakses dari http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/lokakarya/pkado07-1.pdf?secure=1 pada tanggal 16 November 2017 pukul 17.32 WIB.

Setiyanto, Rahmat. 2012. Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik: Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik di Kelompok Tani Pangudi Bogo, Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Tahun 2011. *Skripsi, dipublikasikan*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/25767/Pemberdayaan-Kelompok-Tani-Padi-Organik-Studi-Deskriptif-Kualitatif-mengenai-Pemberdayaan-Kelompok-Tani-Padi-Organik-di-Kelompok-Tani-Pangudi-Bogo-Desa-Dlingo-Kecamatan-Mojosongo-Kabupaten-Boyolali-Tahun-2011 pada tanggal 13 November 2017 pukul 18.34 WIB.

Situmorang, Elina R, A. Manzilati, dan D. Kaluge. 2012. Modal Sosial dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Kabupaten Manokwari. *Jurnal SEPA* 8 (2): 104 –115. Diakses dari http://agribisnis.fp.uns.ac.id/modal-sosial-dan-keberhasilan-pelaksanaan-program-pengembangan-usaha-agribisnis-pedesaan-di-kabupaten-manokwari-2 pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.11 WIB.

Sopandi, Andi. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kybernan* 1 (1): 40-56. Diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19455&val=1230 pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.20 WIB.

Subekti, Sri. 2015. Internalisasi Modal Sosial dalam Kelompok Tani Guna Meningkatkan Dinamika Kelompok Tani di Kabupaten Jember. *Ringkasan Disertasi*, *dipublikasikan* Universitas Jember. Diakses dari http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61219 pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 15.10 WIB.

Sugiri, Lasiman. 2012. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Publica* 2 (1): 56-65. Diakses dari http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/404 pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 14.54 WIB.

Susanti, Sri. 2015. Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 3 (3): 898 – 912. Diakses dari http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/07/Isi%20Jurnal%20fix%20 (07-06-15-03-09-53).pdf pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.58 WIB.

Susilo, Didik Djoko, P. J. Widodo, dan Ubaidillah. 2012. Mekanisasi Proses Pencacahan Bahan Pakan Ternak dalam Pembuatan Pakan Ternak Fermentasi. *Mekanika* 11 (1): 31-36. Dikses dari http://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/mekanika/article/viewFile/104/98 pada tanggal 30 November 2017 pukul 15.15 WIB.

Sutopo, Joko. 2015. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Alternatif Pemberdayan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan yang Mandiri. *Artikel Ilmiah Provinsi Sumatera Barat*. Diakses dari https://sumbarprov.go.id/images/1448812168(4)%20Gapoktan%20yang%20Mandiri%20edit,%20joko.pdf pada tanggal 2 Januari 2018 jam 14.18 WIB.

Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Tampubolon, Dahlan. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Sorot (Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*

dan Ekonomi) 8 (2): 153 – 161. Diakses dari https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS/article/view/2358 pada tanggal 20 November 2017 pukul 16.22 WIB.

Wahyuni, Sri. 2010. Integritas Kelembagaan Petani Gapoktan dan P3A. *Jurnal Iptek Tanaman Pangan* 5 (1): 89-101. Diakses dari ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/ippan/article/view/2617 pada tanggal 2 Januari 2018 pukul 14.16 WIB.

Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1 (1): 87-102. Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/13931/1/Welfare%20Vol%201%20No1%20Januari%20-%20Juni%202012%20CHAPTER%205.pdf pada tanggal 16 November 2017 pukul 15.28 WIB.

Wuysang, Rendy. 2014. Modal Sosial Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Suatu Studi dalam Pengembangan Usaha Kelompok Tanidi Desa Tincep Kecamatan Sonder. *Journal Acta Diurna* III (3): 1-11. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/5637/5171 pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 15.31 WIB.

Yuliarmi, Ni Nyoman. 2011. Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida* 7 (2): 1-20. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/3016 pada tanggal 27 November 2017 pukul 16.48 WIB.

Zuraida, Desiree dan J. Rizal (ed). 1993. *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pemikiran Selo Soemardjan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pemberdayaan Petani 1

by Bhimo Samudro

FILE	BUKU_PEMBERDAYAAN_PETANI.PDF (3.66M)		
TIME SUBMITTED	07-SEP-2018 10:05PM (UTC+0700)	WORD COUNT	78
SUBMISSION ID	998297431	CHARACTER COUNT	489

PEMBERDAYAAN
PETANI

Yogi Pasca Pratama
Bhimo Rizky Samudro
Kresno Sarosa Pribadi

PEMBERDAYAAN PETANI

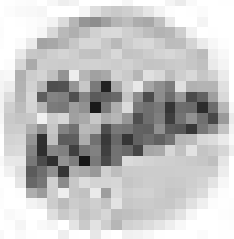

[illegible]

CONTENTS

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

BAB 2
PEMBERDAYAAN KELOMPOK

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

2. [illegible]

[illegible]

BAB 3
STRATEGI PEMBERDAYAAN

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

BAB 4

PENTINGNYA KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL DALAM MENUNJANG PEMBERDAYAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

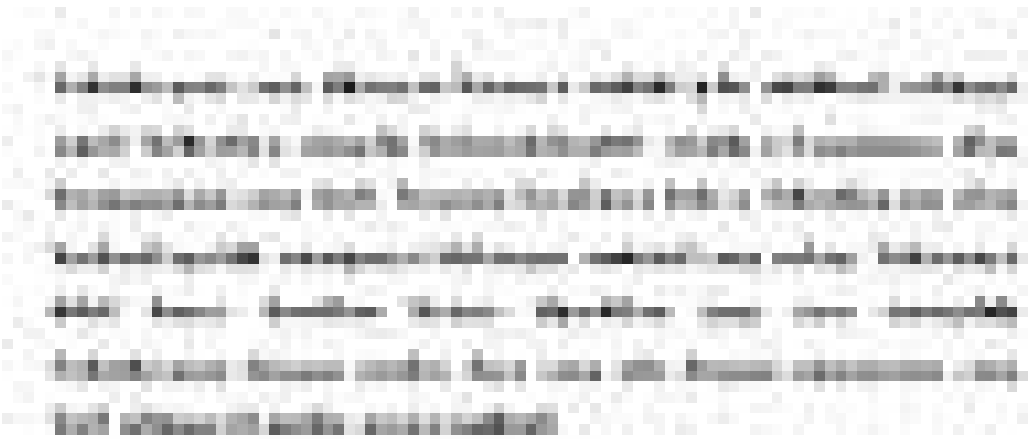

BAB 3
PENGEMBANGAN DAN CARA MENGEMBANGKAN FITUR

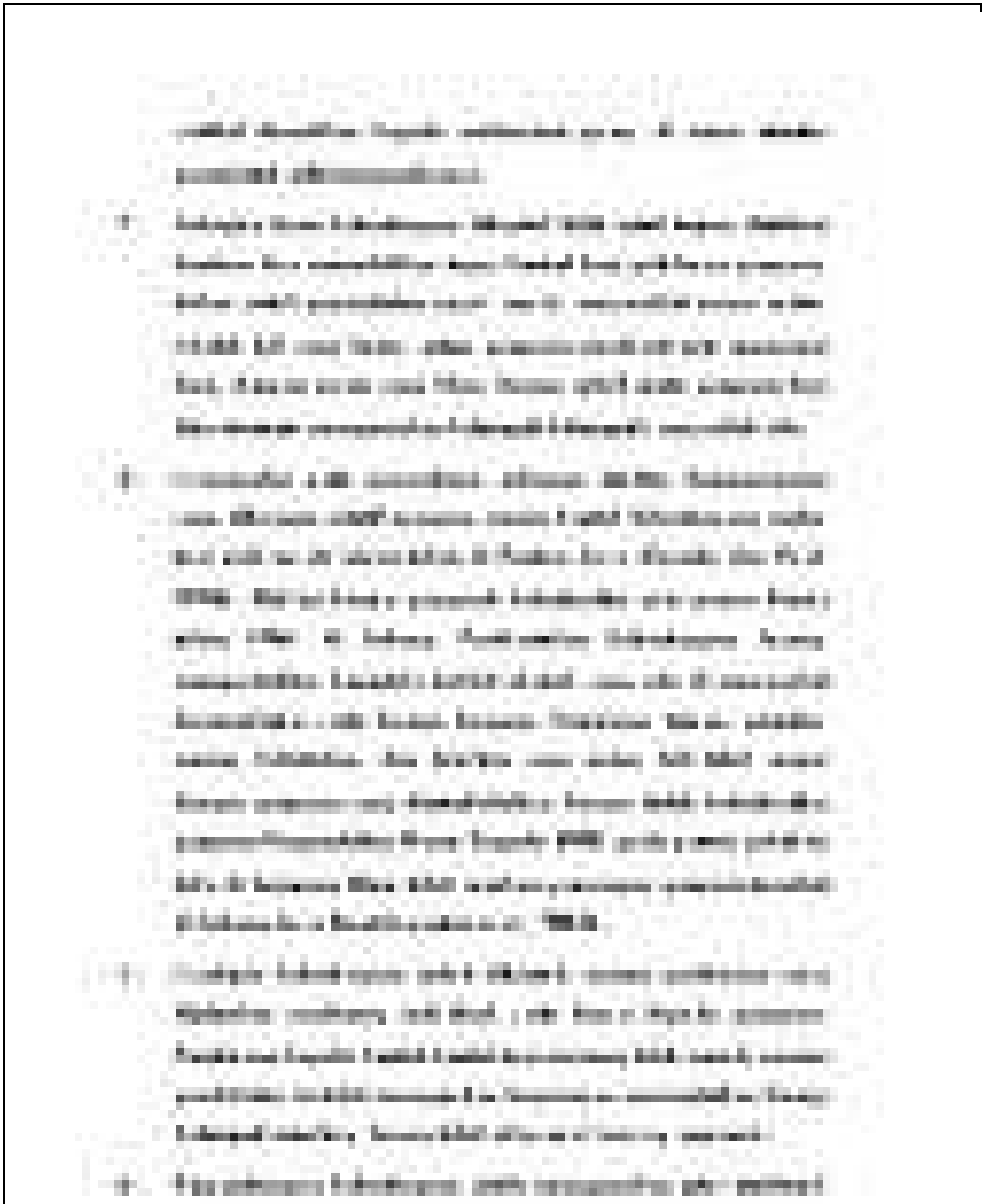

BAB 6
CERNIS PLIMINANSIA
DAN JENIS-JENISNTA

BAB 7
JENIS KAMBING DI INDONESIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB 9
USAHA TERNAK KAMBING BERBASIS PERTANIAN INTEGRATIF

DAFTAR PUSTAKA

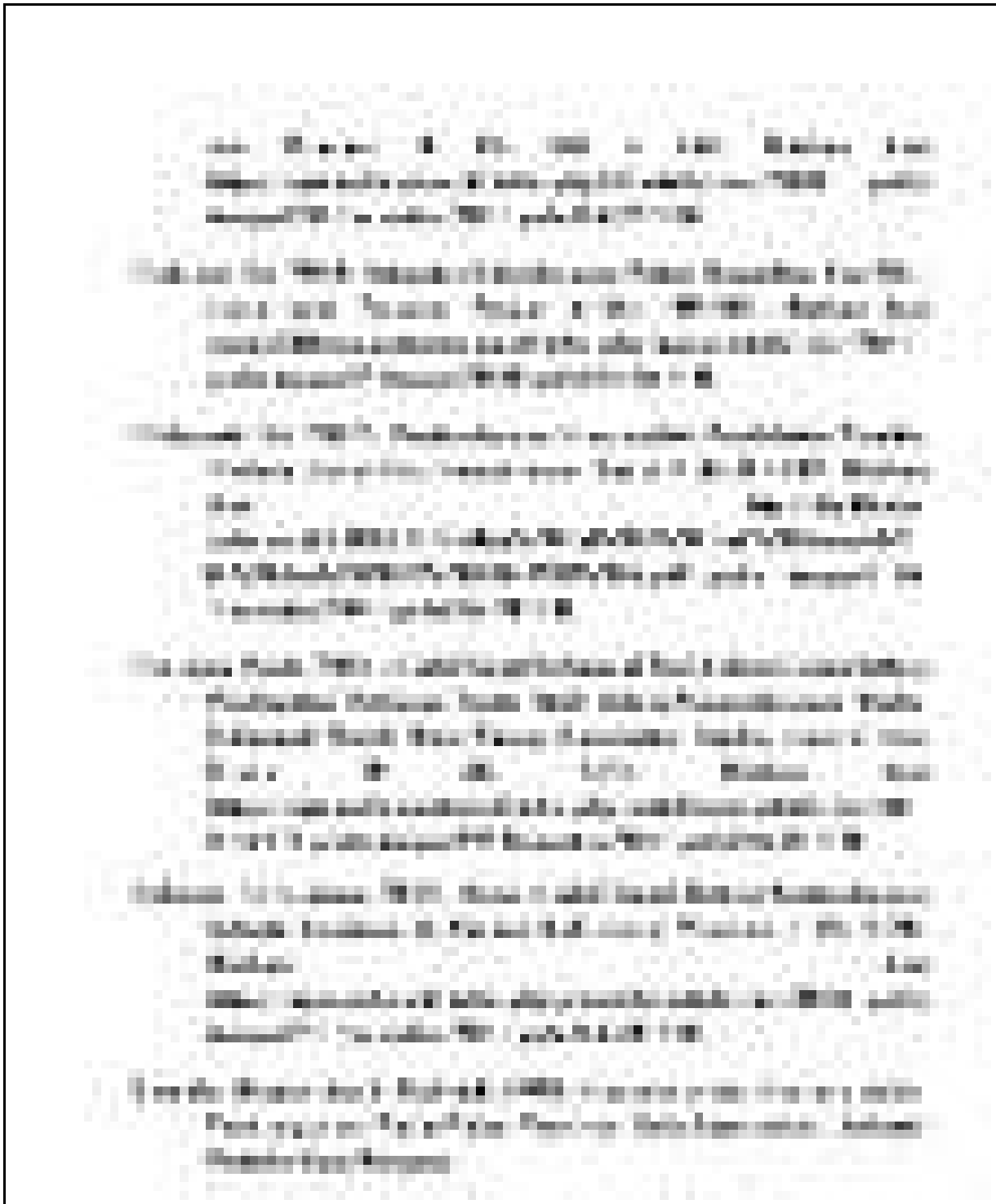

Pemberdayaan Petani 1

ORIGINALITY REPORT

%19	%19	%0	%0
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anzdoc.com Internet Source	%19

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		